

Dinul Islam

Pendidikan Agama Islam Di Perguruan Tinggi Umum

*Prof. Dr. Ajat Sudrajat, M.Ag.
Dr. Marzuki, M.Ag., Drs. Suparlan, M.Ag.,
Syukri Fathudin Achmad Widodo, S.Ag., M.Pd.
Vita Fitria, S.Ag., M.Ag., Dwi Ratnasari, S.Ag., M.Ag.
Sun Choirul Ummah, S.Ag., M.S.I.,
Benni Setiawan, S.Ag., M.S.I.
Tri Ermayani, S.Ag., M.Ag.*



DINUL ISLAM

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN
TINGGI UMUM**

AJAT SUDRAJAT, DKK

DINUL ISLAM

**PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DI PERGURUAN TINGGI UMUM**

**Ajat Sudrajat
Marzuki
Suparlan
Syukri Fathudin Achmad Widodo
Vita Fitria
Dwi Ratnasari
Sun Choirol Ummah
Benni Setiawan
Tri Ermayani**


2016

DINUL ISLAM

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI PERGURUAN TINGGI UMUM

Oleh:

AJAT SUDRAJAT, DKK

ISBN: 978-602-7981-95-9

Cetakan Pertama, 2016

Diterbitkan dan dicetak oleh:

UNY Press

Jl. Gejayan, Gg. Alamanda, Komplek Fakultas Teknik UNY
Kampus UNY Karangmalang Yogyakarta 55281

Telp: 0274 - 589346

Mail: unypress.yogyakarta@gmail.com

© 2016 Ajat Sudrajat, dkk

Anggota Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI)

Anggota Asosiasi Penerbit Perguruan Tinggi Indonesia (APPTI)

Editor: Marzuki

Desain Sampul: Deni Satriya H.

Tata Letak: Pudji Triwibowo

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Ajat Sudrajat, dkk

DINUL ISLAM

Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum

-Ed.1, Cet.1.- Yogyakarta: UNY Press 2016

xi + 473 hlm; 15 x 20,5 cm

ISBN: 978-602-7981-95-9

1. DINUL ISLAM [Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum]

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL		i
KATA PENGANTAR		v
DAFTAR ISI		vii
BAB I	MANUSIA DAN AGAMA	1
	A. Pandangan tentang Manusia	1
	B. Pandangan tentang Agama	5
	C. Teori Asal Usul Agama	14
	D. Unsur-unsur Pokok Agama	22
	E. Klasifikasi Agama	25
	F. Agama Sebagai Fitrah Manusia	29
	G. Peran dan Fungsi Agama	31
	H. Penutup	34
BAB II	ISLAM AGAMA RAHMATAN LIL 'ALAMIN	36
	A. Pendahuluan	36
	B. Konsep <i>Dinul Islam</i>	37
	C. Islam Agama <i>Rahmatan Lil'alam</i>	58
	D. Penutup	74
BAB III	SUMBER HUKUM ISLAM: ANTARA METODOLOGI DAN PENERAPAN	75
	A. Pendahuluan	75
	B. Pengertian Sumber Hukum Islam	76
	C. Alquran Sebagai Sumber Hukum Islam	80
	D. Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam	87
	E. Ijtihad Sebagai Metode Penetapan Hukum	98
	F. Penutup	112

	H. Penutup	306
BAB XI	POLITIK ISLAM DAN MASYARAKAT MADANI	308
	A. Pendahuluan	308
	B. Politik Islam	309
	C. Masyarakat Madani	325
	D. Penutup	340
BAB XII	SISTEM EKONOMI ISLAM	341
	A. Pendahuluan	341
	B. Sistem Ekonomi Islam	343
	C. Dasar Filosofis Ekonomi Islam	344
	D. Politik Ekonomi Islam	356
	E. Kaidah Umum Ekonomi Islam	358
	F. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia	362
	G. Penutup	372
BAB XIII	ISLAM DAN HAK ASASI MANUSIA	374
	A. Pendahuluan	374
	B. Sekilas Tentang HAM	375
	C. HAM, Rakyat, dan Negara	378
	D. HAM dalam Islam	384
	E. Transformasi Sosial Penegakan HAM	389
	F. Penutup	394
BAB XIV	ISLAM DAN GLOBALISASI	396
	A. Pendahuluan	396
	B. Globalisasi dalam Perspektif Islam	400
	C. Lingkup Globalisasi dan Peran Islam	404
	D. Penutup	419

BAB I

MANUSIA DAN AGAMA

Oleh: Ajat Sudrajat

A. Pandangan tentang Manusia

1. Manusia dalam Alquran

Ada dua kata dalam Alquran yang berarti manusia, yaitu kata *insan* dan *basyar* (Shihab, 1996: 277). Kata *insan* terambil dari kata *uns* yang berarti jinak, harmonis, dan tampak. Pendapat ini, jika ditinjau dari sudut pandang Alquran lebih tepat, demikian menurut Quraish Shihab apabila dibandingkan dengan pendapat yang mengatakan bahwa kata *insan* terambil dari kata *nasiya* yang berarti lupa, atau *nâsa-yanûsu* yang berarti berguncang.

Kata *insan* digunakan dalam Alquran untuk menunjuk kepada manusia dengan seluruh totalitasnya, jiwa dan raga. Manusia yang berbeda antara satu orang dengan yang lainnya akibat perbedaan fisik, mental, dan kecerdasan. Dalam Alquran kata *insan* juga biasanya sering dihadapkan dengan *jin* atau *jan*. Jin adalah makhluk halus yang tidak tampak, sedangkan manusia adalah makhluk yang nyata lagi ramah.

Kata *basyar* terambil dari akar kata yang pada mulanya berarti *penampakkan sesuatu dengan baik dan indah*. Dari akar

kata yang sama lahir kata *basyarah* yang berarti kulit. Manusia dinamai *basyar* karena kulitnya tampak jelas, dan berbeda dengan kulit binatang yang lain. Alquran menggunakan kata ini untuk menunjuk manusia dari sudut lahiriyah serta persamaannya dengan manusia secara keseluruhan. Dari sisi lain kata ini sering termuat dalam ayat yang isinya menceritakan tentang proses kejadian manusia dengan tahapan-tahapannya sehingga mencapai tahap kedewasaan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ.

Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah dia menciptakan kamu dari tanah, Kemudian tiba-tiba kamu (menjadi) manusia yang berkembang biak (Q.S. Al-Rum, 30: 20).

Kata *basyar* yang diartikan dengan berkembang biak menunjukkan bahwa manusia memikul tanggung jawab dalam kehidupannya. Oleh karena itu, tugas kekhalifahan dibebankan kepadanya.

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ

Dan (ingatlah), ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan seorang manusia dari tanah liat kering (yang berasal) dari lumpur hitam yang diberi bentuk (Q.S. Al-Hijr, 15:28).

Selain Alquran membicarakan proses penciptaan manusia, baik dalam pengertian yang khusus dan umum, yang banyak dibicarakan Alquran adalah berkaitan dengan sifat-sifat dan potensinya. Banyak ditemukan dalam ayat-ayat Alquran yang memuji dan memuliakan manusia, seperti pernyataan bahwa manusia tercipta dalam bentuk dan keadaan yang sebaik-baiknya (Q.S. Al-Tin, 95: 5), dan penegasan tentang

kemuliaan manusia dibanding makhluk-makhluk lainnya, (Q.S. Al-Isra', 17 : 70). Allah Swt. berfirman:

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ

Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya (Q.S. Al-Tin, 95: 4).

Allah Swt. juga berfirman:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَخَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkat mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan" (Q.S. Al-Isra', 17: 70).

Tetapi, di samping kemuliaannya di atas, sering pula manusia mendapat celaan dari Allah karena amat aniaya dan mengingkari nikmat yang telah dianugerahkan kepadanya (Q.S. Ibrahim, 14:13), sangat banyak membantah (Q.S. Al-Kahfi, 18:54), dan bersifat keluh kesah lagi kikir (Q.S. Al-Ma'arij, 70: 19). Dalam Q.S. Al-Kahfi Allah Swt. berfirman:

وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنْسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا

Dan sesungguhnya Kami telah mengulang-ulangi bagi manusia dalam Alquran ini bermacam-macam perumpamaan, dan manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah (Q.S. Al-Kahfi, 18: 54).

Dikatakan dalam Alquran bahwa setelah manusia diciptakan dari tanah dan telah sempurna kejadiannya, maka dihembuskanlah kepadanya Ruh Ilahi (Q.S. Shad, 38: 71-72). Dari sini jelaslah bahwa manusia merupakan kesatuan dua unsur pokok yang tidak dapat dipisahkan, yaitu antara unsur jasmani dan ruhani.

إِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ.

Ingatlah! ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat: "Sesungguhnya Aku akan menciptakan manusia dari tanah". Maka apabila telah Kusempurnakan kejadiannya dan Kutiupkan kepadanya ruh (ciptaan)-Ku, maka hendaklah kamu tersungkur dengan bersujud kepada-Nya" (Q.S. Shad, 38: 71-72).

Isyarat yang menyangkut unsur immaterial manusia antara lain berkaitan dengan keberadaan ruh ini. Namun demikian, sangat sulit untuk menetapkan makna yang terkandung dalam kata ruh ini, apalagi berbicara tentang substansinya. Allah hanya mengisyaratkan bahwa ruh itu adalah urusannya, dan bahwa manusia tidak diberi ilmu kecuali sedikit saja (Q.S. Al-Isra', 17: 85). Meskipun demikian, ada yang mencoba memberikan pengertian secara umum bahwa ruh ini merepresentasikan atau menggambarkan adanya sifat-sifat dan potensi-potensi yang baik yang dimiliki manusia.

2. Manusia dalam Perspektif Kebudayaan

Ada ungkapan filosofis yang berbunyi demikian: "Kenalilah dirimu sendiri". Dalam menanggapi ungkapan yang bercorak perintah ini sudah tentu akan melahirkan pendapat dan kecenderungan yang beraneka ragam tentang manusia. Sokrates misalnya mendekati manusia sebagai individu, sementara menurut Plato manusia harus dipelajari dari sudut kehidupan sosial dan politiknya. Namun demikian, kehidupan politik bukanlah satu-satunya hidup komunal manusia (Cassirer, 1944: 97).

Meskipun kita tidak mempunyai gambaran yang paripurna tentang manusia, dan memang perlu menghindari

konsep totalitarian tentang manusia, demikian kata Sastrapratedja, tetapi yang perlu disadarai bahwa manusia adalah makhluk yang historis (Sastrapratedja, 1982: ix). Comte mengatakan bahwa "mengenal diri adalah mengenal sejarah". Selanjutnya ia menyatakan bahwa untuk mengerti manusia tidak cukup apabila hanya dilihat dari sudut fisika, kimia, dan biologi saja. Hakikat manusia hanya dapat dilihat dari perjalanan sejarahnya. Ernst Cassirer lebih jauh mengatakan bahwa manusia tidak dapat didesinisikan berdasarkan prinsip invern metafisiknya atau berdasarkan kemampuan insting bawaannya meskipun dapat diuji secara empiris. Ciri utama manusia, ciri khasnya, bukanlah kodrat fisik atau metafisiknya, melainkan karyanya (Cassirer, 1944: 100).

Apa yang dapat dilihat dari sudut pengalaman manusia adalah adanya suatu rangkaian *antropological constants* yang merupakan dorongan-dorongan dan orientasi tetap manusia. Sekurang-kurangnya ada enam *antropological constants* yang bisa dilihat dari pengalaman sejarah umat manusia: (a) relasi manusia dengan kejasmanian, alam, dan lingkungan ekologis; (b) keterlibatan dengan sesama; (c) keterikatan dengan struktur sosial dan institusional; (d) ketergantungan masyarakat dan kebudayaan pada waktu dan tempat; (e) hubungan timbal balik antara teori dan praksis; dan (f) kesadaran religius. Keenam *antropological constants* ini merupakan satu sintesis dan masing-masing saling berpengaruh satu dengan lainnya.

B. Pandangan tentang Agama

Dinyatakan oleh beberapa ahli agama bahwasannya bukan persoalan yang gampang dan mudah untuk membuat rumusan pengertian atau definisi agama yang dapat menampung semua jenis agama yang ada. Seperti halnya yang

dinyatakan oleh A. Mukti Ali, "Barangkali tidak ada kata yang paling sulit diberi pengertian dan definisi selain dari kata agama" (Anshari, 1986: 39). Hal senada dikemukakan pula oleh Quraish Shihab (2013: 209) yang menyatakan bahwa 'agama' adalah kata yang sangat mudah diucapkan dan mudah juga untuk menjelaskan maksudnya, tetapi sangat sulit memberikan pengertian atau definisi yang tepat. Sebuah definisi mensyaratkan menghimpun semua unsur yang didefinisikan sekaligus mengeluarkan segala yang tidak termasuk unsurnya.

Menurut Mukti Ali, setidaknya ada tiga alasan mengapa demikian sulit untuk membuat rumusan agama yang bisa diterima secara umum. *Pertama*, karena pengalaman agama itu bersifat batini dan subjektif, juga sangat individualistis. *Kedua*, barangkali tidak ada orang yang berbicara begitu bersemangat dan emosional lebih daripada membicarakan agama. Maka dalam membahas pengertian agamapun selalu ada emosi yang kuat. *Ketiga*, konsepsi tentang agama, akan dipengaruhi pula oleh tujuan orang yang memberikan pengertian agama itu (Anshari, 1986: 30).

Untuk menuju kepada pengertian atau definisi agama, ada baiknya terlebih dahulu melihat pengertian-pengertian yang ada di sekitar istilah yang selama ini dipakai untuk menyebut keyakinan yang dianut oleh umat manusia. Istilah-istilah itu adalah agama, *religion*, dan *al-din*.

1. Agama

Kata agama dipinjam atau berasal dari bahasa Sansekerta untuk menunjuk kepercayaan agama Hindu dan Buddha. Dalam perkembangannya kata ini diserap ke dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk menyebut kepercayaan yang ada di Indonesia secara umum. Ada beberapa ahli agama

yang memberikan arti terhadap kata ini, antara lain sebagai berikut.

Menurut Harun Nasution, kata agama berasal dari kata *A* dan *Gam*. *A* diartikan *tidak* dan *gam* diartikan *pergi*. Jadi *agama* secara harfiah berarti *tidak pergi*. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama sebagai sesuatu yang tetap menyertai kehidupan manusia. Agama tidak pernah pergi dan lepas dari kehidupan manusia. Dalam kenyataan hidup manusia agama senantiasa diwarisi secara turun-temurun.

Agama berarti teks atau kitab suci. Disebut demikian karena semua ajaran agama terdapat dalam kitab-kitab suci agama. Pada umumnya agama-agama memiliki kitab suci. Selanjutnya dikatakan bahwa *gam* berarti tuntunan. Inti agama adalah adanya seperangkat aturan. Oleh karena itu, setiap agama membawa ajaran-ajaran yang akan menjadi tuntunan hidup para pemeluknya (Nasution, 1979: 9; Shihab, 2001: 52).

Agama berasal dari kata *A* dan *Gama*. *A* diartikan dengan 'tidak' dan *gama* diartikan dengan *kocar-kacir* atau *berantakan*. Jadi, agama secara harfiah berarti *tidak berantakan* atau *hidup teratur*. Agama yang dimaksudkan dalam arti ini adalah bahwa agama memberikan serangkaian aturan kehidupan kepada para penganutnya sehingga hidupnya tidak berantakan. Agama mengantarkan para pemeluknya kepada suatu cara hidup yang teratur (Anshari, 1986: 11). Bahasa Sansekerta adalah bagian dari rumpun bahasa Indo-Jerman. Termasuk ke dalam rumpun ini adalah bahasa Belanda dan Inggris. Dalam bahasa Inggris ada kata *to go*, dan dalam bahasa Belanda ada kata *ga* atau *gaan* yang pengertiannya sama dengan kata *gam*. Dengan diberi awalan dan akhiran *a*, pengertiannya berubah dari *pergi* menjadi *jalan*. Dengan demikian, agama berarti *jalan*. Agama dalam arti ini adalah sebagai jalan atau petunjuk kehidupan yang akan

mengantarkan para pemeluknya menuju keselamatan. Pengertian *jalan* ditemukan sebagai ciri hakiki dalam banyak agama. *Taoisme* dan *Shinto* itu juga bermakna jalan (Gazalba, 1978: 114).

Suatu padanan kata yang menarik dari kata agama ditemukan dalam bahasa Jawa, yaitu kata *ageman*, *ugeman*, dan *gaman*. Pertama, kata *ageman* yang berarti pakaian, memiliki fungsi untuk melindungi si pemakainya. Fungsi perlindungan ini bisa berarti bercorak lahiriyah maupun bathiniyah. Fungsi lahiriah, pakaian akan menghindarkan pemakainya dari penyakit yang disebabkan iklim atau celaan orang lain. Fungsi batiniah, dengan berpakaian berarti seseorang akan terjaga dan terpelihara martabat dan harga dirinya.

Kedua, kata *ugeman* yang berarti pegangan atau kaidah hidup. Seseorang yang ingin berhasil dan selamat dalam kehidupannya dituntut untuk taat dan patuh pada kaidah kehidupan. Dengan menataati kaidah-kaidah kehidupan seseorang akan terjamin keselamatan hidupnya. Seorang orang tua akan menasihati anak-anaknya agar mereka patuh dengan *ugeman* kehidupan sehingga cita-cita hidupnya tercapai.

Ketiga, kata *gaman* yang berarti alat. *Gaman* bisa meliputi berbagai jenis. Akan tetapi dapat ditegaskan di sini, fungsi dari *gaman* adalah bisa sebagai alat perlindungan atau alat untuk mencari nafkah. Kedua fungsi ini pada akhirnya akan memberikan keselamatan dan kesejahteraan kepada pemiliknya. Ketiga kata ini memiliki kesejalaran arti dengan kata agama, yaitu kehidupan yang selamat dan sejahtera.

Berangkat dari beberapa arti di atas, agama dapat dirumuskan sebagai "Seperangkat aturan atau ketentuan hidup yang melekat dalam diri manusia agar hidupnya teratur yang merupakan cara menuju suatu kehidupan yang selamat".

Persoalan yang masih harus ditanyakan dari beberapa arti di atas adalah mengenai sumber aturan itu. Tetapi diyakini bahwa aturan-aturan itu berasal dari sesuatu yang dipandang melebihi kekuasaan manusia, yakni Tuhan.

2. Religion .

Kata *religion* (bahasa Inggris) dan *religie* (bahasa Belanda) berasal dari bahasa Latin. Ada dua kata yang menjadi akar dari kata *religion*, yaitu *religere* dan *religare*. Pertama, kata *religere* menurut Cicero berarti *to treat carefully* (melakukan perbuatan dengan penuh kehati-hatian), dan diartikan juga dengan melakukan sesuatu perbuatan dengan penuh penderitaan atau mati-matian. Perbuatan yang dimaksud di sini ialah berupa usaha atau sejenis peribadatan yang dilakukan berulang-ulang dalam rangka mendekati sesuatu yang gaib, Tuhan. Kata *religere* juga mengandung arti *mengumpulkan* atau *membaca*. Maksudnya bahwa agama merupakan kumpulan cara-cara mengabdikan kepada sesuatu yang gaib (Tuhan), atau kumpulan cara-cara mengabdikan kepada Tuhan yang bisa dibaca dalam kitab-kitab suci agama.

Kedua, kata *religion* berasal dari bahasa Latin *religare*. Kata *religare* menurut Lactantius berarti *to bind together* (mengikat menjadi satu atau perikatan bersama). Ikatan di sini bisa berarti komunal, yaitu bahwa agama merupakan ikatan kependetaan atau ikatan orang-orang suci yang bebas dari dosa atau berusaha untuk membebaskan diri dari dosa. Di sisi lain bahwa agama membawa ajaran yang berbentuk aturan, dan bahwasanya aturan-aturan itu mengikat kepada para pemeluknya (Nasution, 1979: 10).

Meskipun tidak ada satu definisi tentang *religion* yang dapat diterima secara umum, namun sejumlah ahli berusaha untuk merumuskannya. Dalam *Encyclopaedia of Religion* misalnya, Vergilius Ferm mengajukan rumusan sebagai

berikut: *a religion is a set of meaning and behaviors having reference to the individuals who are or were could be religious*, atau *religion is generic term referring to all conceivable religions, formal or informal* (Ferm, 1959: 647).

3. *Al-Din*

Kata *Din* yang merupakan kumpulan huruf *dal*, *ya*, dan *nun* dalam bahasa Arab mempunyai banyak arti. *Din* dalam bahasa Semit berarti undang-undang atau hukum. Sementara itu dalam bahasa Arab kata *din* mengandung arti: menguasai, menundukkan, patuh, hutang, balasan, dan kebiasaan. Secara keseluruhan *din* berarti peraturan-peraturan yang merupakan hukum yang harus dipatuhi. *Din* juga berarti membawa kewajiban-kewajiban yang kalau tidak dijalankan akan menjadi hutang bagi pengikutnya. Pada saat yang sama adanya kewajiban tersebut berakibat akan adanya balasan. Karena seringnya suatu perbuatan dilakukan, maka perbuatan itu kemudian menjadi kebiasaan (Nasution, 1979: 9).

Menurut Naquib al-Atas arti dasar dari istilah *din* dapat dipadatkan menjadi empat, yaitu: a. keadaan berhutang, b. kepatuhan, c. kecenderungan atau tendensi alamiah, dan d. kekuasaan yang bijaksana (Gauhar, 1982: 36).

Pertama, kata kerja *dana* yang ditarik dari kata *din* berarti keadaan berhutang. Dalam suatu keadaan, ketika seseorang berhutang maka ia harus tunduk dan menyerah. Ia harus tunduk dan menyerah serta patuh kepada hukum atau aturan hutang-piutang. Begitu pula dalam beberapa hal berarti ia menyerah dan patuh kepada si pemberi hutang.

Mungkin timbul pertanyaan, bagaimana konsep keberhutangan ini diterangkan dalam konteks hidup beragama. Jawabannya adalah bahwa manusia berhutang kepada Allah, karena Allah telah menciptakan dan memberi kehidupan kepada manusia. Seseorang yang merenungi asal-

usulnya dengan sepenuh hati akan menyadari bahwa sebelumnya ia tidak mengetahui kemungkinan bagi keberadaannya. Maka wajarlah apabila manusia yang dengan sepenuh hati merepungi hal ini, akan menyadari melalui intuisinya bahwa rasa berhutang itu tidak dapat disalurkan kepada orang tuanya, karena ia mengetahui bahwa keduanya pun tunduk kepada proses yang sama. Manusia tidak menyebabkan dirinya sendiri tumbuh dan berkembang dari segumpal darah kental menjadi seorang manusia sempurna.

Dalam Alquran Allah Swt. menyatakan:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ

Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka (seraya berfirman): "Bukankah Aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab: "Betul (Engkau Tuhan kami), kami bersaksi". Kami lakukan yang demikian ini agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan: "Sesungguhnya kami adalah orang-orang yang lengah terhadap ini (keesaan Tuhan)". (Q.S. Al-A'raf, 7: 172).

Kedua, *din* berarti kepatuhan dan ketundukan. Ketundukan ini merupakan akibat dari konsep keberhutangan. Pengembalian hutang ini berarti memasrahkan diri untuk berbakti atau berkhidmat kepada Tuihan. Ketundukan yang dimaksud adalah ketundukan yang sadar dan suka rela. Karena jika ketundukan yang dilakukan tanpa sadar, tidak dapat berarti ketundukan yang benar. Ketundukan ini pun tidak sama dengan ketundukan sementara atau yang berubah-ubah, karena ketundukan yang sejati adalah sebuah perbuatan yang terus menerus dihayati selama kehidupan seseorang.

Ketundukan ini tidak hanya beroperasi dalam hati tanpa mewujudkan ke luar dalam perbuatan fisik seperti perbuatan dalam mematuhi hukum-hukum Allah. Ketundukan kepada kehendak Allah berarti pula kepatuhan kepada hukum-Nya. Pernyataan yang menunjukkan ketundukan seperti ini adalah kata *aslama*, seperti yang dinyatakan Alquran, "*Dan siapakah yang lebih baik agamanya (din) dari pada orang-orang yang ikhlas menyerahkan (aslama) dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan, dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus*" (Q.S. Al-Nisa', 4: 125).

Ketiga, *din* berarti kecenderungan alamiah. Kecenderungan alamiah di dalam diri manusia untuk mengabdikan dan menyembah Allah dikatakan sebagai *din*, karena konotasinya sebagai sebuah tata-perilaku yang dilakukan manusia. Di sini *din* berarti mode atau tata-tingkah laku yang konsisten dengan hal-hal yang mencerminkan ketundukan kepada hukum dan aturan yang telah ditunjukkan Allah. Tetapi *din* dalam konteks yang lebih khusus menunjukkan kepada keadaan alamiah yang disebut dengan *fitrah*, yakni pola penciptaan Allah terhadap segala sesuatu yang diciptakan-Nya. Setiap sesuatu diciptakan Allah dengan pola penciptaan-Nya dan diletakkan pada tempatnya yang tepat. Hal inilah yang disebut *sunnatullah*. Tunduk kepada *fitrah* ini melahirkan keharmonisan, karena ketundukan ini berarti menyadari keberadaan dirinya secara tepat. Ketundukan, seperti dikatakan di atas, berarti ketundukan yang sadar dan sukarela, dan ketundukan ini tidak menyebabkan hilangnya kemerdekaan si manusia.

Keempat, *din* bermakna kekuasaan yang bijaksana. Seperti disebutkan di atas manusia dalam keadaan berhutang kepada Allah. Artinya manusia milik Allah dan eksistensinya hanya dipinjamkan kepadanya untuk sementara waktu. Meskipun demikian, manusia masih bisa meminjamkan

sesuatu yang dimilikinya dari Allah itu dipinjamkan juga kepada Allah. Alquran menyatakan, "*Siapakah yang mau memberi pinjaman (yuqradu) kepada Allah, sesuatu pinjaman yang baik (qardan hasanan) yang akan dibayar oleh Allah dengan berlipat ganda*" (Q.S. Al-Baqarah, 2: 245).

Perkataan pinjaman yang baik yang dikhususkan kepada manusia dalam ayat di atas merupakan sebuah kiasan, yang maksudnya adalah "pengabdianya kepada Allah atau perbuatan baik", karena hal ini sebagai milik manusia, dan karena itu pula ia mendapat imbalan yang berlipat dari Allah.

Allah dalam kedudukan ini adalah sebagai 'pemberi kelimpahan dan pengganjar serta Hakim yang bijaksana', dan karenanya Allah disebut sebagai *Al-Dayyan*. Ia adalah Raja, Malik dari hari pengadilan atau hari perhitungan. Kenyataan bahwa Allah disebut Raja menunjukkan bahwa Ia memiliki kekuasaan atas alam semesta. Dengan kebijaksanaannya, Ia menunjukkan kepada manusia jalan yang mesti ditempuhnya.

Apabila dikatakan manusia berusaha menyempurnakan maksud dari penciptaan atas diri dan eksistensinya, jelaslah bahwa kewajibannya untuk mengabdikan kepada Allah dirasakan sebagai hal yang wajar. Pengabdian manusia kepada Allah itu muncul sebagai sebuah kecenderungan alamiah di dalam dirinya.

Setelah memperbincangkan masing-masing arti dari istilah di atas, berikut ini adalah beberapa definisi tentang agama yang dapat dipertimbangkan.

- a. Pengakuan terhadap adanya hubungan manusia dengan kekuatan gaib yang harus dipatuhi.
- b. Pengakuan terhadap adanya kekuatan gaib yang menguasai manusia.
- c. Mengikatkan diri pada suatu bentuk hidup yang mengandung pengakuan adanya suatu sumber yang berada

di luar diri manusia dan yang mempengaruhi perbuatan-perbuatan manusia.

- d. Kepercayaan pada sesuatu kekuatan gaib yang menimbulkan cara hidup tertentu.
- e. Suatu sistem tingkah laku (*code of conduct*) yang berasal dari suatu kekuatan gaib.
- f. Pengakuan terhadap adanya kewajiban-kewajiban yang diyakini bersumber pada suatu kekuatan gaib.
- g. Pemujaan terhadap kekuatan gaib yang timbul dari perasaan lemah dan perasaan takut terhadap kekuatan misterius yang terdapat dalam alam sekitar manusia.
- h. Ajaran-ajaran yang diwujudkan Tuhan kepada manusia melalui para rasul-Nya (Nasution, 1979: 10).
- i. Suatu peraturan Tuhan yang mendorong jiwa seseorang yang mempunyai akal memegang peraturan dengan kehendaknya sendiri, untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan kebahagiaan hidup di akhirat kelak (Mu'in, 1981: 121).

C. Teori Asal Usul Agama

Terkait dengan relasi antara manusia dan agama, ada beberapa teori mengenai benih kepegangan manusia terhadap agama dan juga teori mengenai kepercayaan keagamaan yang dipandang paling tua. Setidaknya ada dua cara pandang mengenai keberagamaan manusia. Satu pihak mengatakan bahwa agama merupakan keinginan Tuhan untuk menyelamatkan kehidupan manusia. Karena kasihnya itu, manusia ditunjuki jalan menuju keselamatan hidup. Di pihak lain agama merupakan cara manusia untuk mencari keselamatan dengan menyandarkan kehidupannya kepada kehendak Tuhan.

Cara pandang kedua diwakili oleh adanya pendapat yang menyatakan bahwa benih yang melahirkan agama adalah karena *rasa takut* yang menyertai hidup manusia. Agama bermula dari

tanggapan manusia terhadap kebutuhan-kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi sepenuhnya di dunia ini. Kebutuhan dasar manusia (primitif) adalah keamanan terhadap berbagai ancaman, apapun bentuknya, baik lahiriah atau ruhaniah (Thouless, 1992: 105).

Ketika manusia menghadapi fenomena alam yang dahsyat seperti adanya wabah penyakit, gunung meletus, banjir, gempa bumi, kematian dan kejadian-kejadian lainnya, mereka tidak berdaya menghadapinya. Perasaan yang muncul adalah rasa takut yang sangat dalam menghadapi fenomena tersebut. Pada saat kritis semacam itulah terpikir akan adanya kekuatan 'luar biasa' di luar diri mereka. Dalam upaya untuk menangkal adanya kejadian-kejadian dahsyat semacam itu, muncullah gagasan untuk memberikan sesaji, agar kekuatan itu bersikap lunak dan tidak mengganggu kehidupannya. Respons manusia terhadap adanya kekuatan 'luar biasa' di luar dirinya telah melahirkan konsep 'yang gaib' beserta perangkat perilaku manusia terhadapnya.

Menurut Sigmund Freud (1856-1939), seorang ahli ilmu jiwa, benih munculnya agama berawal dari Oedipus kompleks. Mula-mula seorang anak merasakan dorongan seksual terhadap ibunya, yang pada akhirnya membunuh ayahnya sendiri, karena sang ayah merupakan penghalang bagi tercapainya tujuan tersebut. Namun, pembunuhan ini melahirkan penyesalan di dalam jiwa sang anak, sehingga lahirlah penyembahan terhadap ruh sang ayah. Di sinilah kemudian bermula rasa agama dalam jiwa manusia (Shihab, 2013: 210).

Jalan pikiran Freud ini membawa kepada kesimpulan bahwa agama merupakan regresi kepada fase kanak-kanak. Motivasi beragama, alasan mengapa orang memeluk suatu agama adalah untuk mengatasi frustrasi. Frustrasi yang dialami seseorang, dalam bentuk frustrasi sosial, mengarahkan seseorang lari kepada dunia lain yang dikhayalkan bisa memberikan kompensasi yang menyenangkan (Dister, 1982: 86-87).

Sementara itu para ilmuwan Islam berpendapat bahwa benih munculnya agama berasal dari penemuan manusia terhadap kebenaran, keindahan dan kebaikan. Manusia pertama, yang diperintahkan oleh Allah untuk turun ke bumi, diberi pesan agar mengikuti petunjuk-Nya, jika petunjuk itu sampai kepadanya (Q.S. Al-Baqarah,2: 23). Petunjuk pertama yang melahirkan agama, menurut mereka, adalah ketika Adam -- dalam perjalanannya di bumi-- menemukan ketiga hal yang disebutkan di atas.

Sebagai ilustrasi dapat diduga bahwa Adam menemukan keindahan pada alam raya, pada bintang yang gemerlapan dan keindahan alam lainnya. Ditemukannya kebaikan pada angin sepoi yang menyegarkan di saat gerah kepanasan atau pada air yang menyejukkan di kala ia kehausan. Kemudian ditemukannya kebenaran dalam ciptaan Tuhan yang terbentang di alam raya dan di dalam dirinya sendiri.

Gabungan ketiga hal ini melahirkan kesucian. Sang manusia, yang memiliki naluri ingin tahu berusaha untuk mendapatkan apakah yang paling indah, benar dan baik? Jiwa dan akalunya mengantarkannya pada suatu kesimpulan akan adanya yang Maha Suci. Dengan itu kemudian ada usaha dari dirinya untuk berhubungan dengan-Nya dan berusaha untuk mencontoh sifat-sifat yang dimiliki-Nya. Dari sini agama lahir dan dari sini pula lahir proses kehidupan beragama sebagai upaya manusia untuk berhubungan dengan-Nya (Shihab, 2013: 210).

Pendapat tentang agama juga dikemukakan oleh **Edward B. Tylor** (1832-1917). Teori yang dikemukakan Tylor mengenai asal usul agama oleh Koentjaraningrat disebut dengan '**Teori Jiwa**' (Koentjaraningrat, 1980: 220-221). Menurut Tylor asal mula religi atau agama adalah kesadaran manusia akan paham jiwa. Kesadaran akan jiwa ini disebabkan karena dua hal. *Pertama*, perbedaan yang nampak antara hal-hal yang hidup dan mati. Perbedaan ini menyadarkan manusia akan adanya jiwa.

Kedua, peristiwa mimpi. Dalam mimpi manusia melihat dirinya sendiri berada di tempat lain dan memiliki kekuatan yang luar biasa.

Tylor juga mengemukakan teori tentang evolusi agama. Menurutny^a, pada tingkat paling tua manusia percaya akan makhluk halus yang menempati alam sekelilingnya. Makhluk-makhluk yang karena bertubuh halus tidak dapat ditangkap oleh panca indera manusia. Mereka mampu berbuat sesuatu yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Makhluk halus ini kemudian mendapat tempat yang terhormat dalam kehidupan manusia. Mereka menjadi objek penghormatan dan penyembahan yang disertai berbagai upacara berupa doa, sajian dan korban. Agama seperti ini oleh Tylor disebut *animisme*. Animisme inilah menurutnya sebagai bentuk agama yang paling tua. Tingkat ini disebut dengan tahapan *animistik*.

Pada tingkat kedua dalam evolusi agama, manusia yakin akan adanya jiwa di belakang peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala alam. Sungai-sungai yang mengalir, gunung-gunung yang meletus, gempa bumi, taufan, gerak matahari dan tumbuh-tumbuhan serta unsur-unsur alam lainnya, disebabkan oleh makhluk-makhluk halus yang menempati alam. Jiwa alam ini kemudian dipersonifikasikan dan dipandang memiliki kepribadian dengan kemauan dan pikiran. Bentuk personifikasi ini berlanjut dengan kepercayaan kepada dewa-dewa alam. Tahap evolusi kedua disebut tahapan *politeistik*.

Tingkat ketiga dalam evolusi agama, terjadi bersamaan dengan timbulnya susunan kenegaraan dalam masyarakat. Muncul keyakinan bahwa dewa-dewa alam itu juga hidup dalam suatu susunan kenegaraan, yang serupa dengan dunia manusia. Terdapat suatu hirarki dalam kehidupan para dewa, dari dewa yang pangkatnya rendah sampai ada dewa yang tertinggi. Susunan serupa itu lambat laun menimbulkan kesadaran bahwa semua dewa pada hakikatnya hanya merupakan penjelmaan dari

satu dewa saja, yaitu dari dewa tertinggi. Akibat dari keyakinan itu adalah berkembangnya keyakinan kepada satu Tuhan dan timbulnya agama yang bersifat monoteisme. Monoteisme merupakan tingkat evolusi terakhir dalam evolusi agama manusia.

Teori berikutnya tentang agama dikemukakan oleh J.G. Frazer (1854-1941). Teori Frazer mengenai asal mula agama disebut dengan **Teori Batas Akal** (Koentjaraningrat, 1980: 222). Manusia dalam memecahkan persoalan hidupnya adalah dengan akal dan pengetahuannya. Tetapi akal dan pengetahuannya itu ternyata terbatas. Makin terbelakang kebudayaan manusia, makin sempit lingkaran batas akal dan pengetahuannya. Karena itu dalam memecahkan persoalan hidup yang tak dapat dipecahkan dengan akal, manusia lari dengan menggunakan magis atau ilmu gaib.

Menurut Frazer, magis adalah tindakan manusia untuk mencapai suatu maksud melalui kekuatan-kekuatan yang ada di dalam alam, serta seluruh kompleks anggapan yang ada di belakangnya. Manusia mula-mula hanya mempergunakan ilmu gaib untuk memecahkan persoalan hidup yang ada di luar batas kemampuannya. Pada waktu itu agama belum ada dalam kebudayaan manusia. Lambat laun terbukti bahwa banyak dari tindakan magis itu tidak membawa hasil. Mulailah manusia yakin bahwa alam ini dihuni oleh kekuatan lain yang lebih berkuasa, yakni Tuhan. Dan mulailah manusia mencari hubungan dengan *kekuatan* itu. Dengan demikian, timbullah agama dalam kehidupan manusia.

Memang menurut Frazer ada suatu perbedaan besar antara magis dan agama. Magis adalah segala sistem tingkah laku dan sikap manusia untuk mencapai suatu maksud dengan menguasai dan mempergunakan kekuatan-kekuatan gaib yang ada di dalam alam ini. Sebaliknya, agama adalah segala sistem tingkah laku manusia untuk mencapai suatu maksud dengan

cara menyandarkan diri kepada kemauan dewa-dewa penguasa alam (O'Dea, 1985:13).

Ahli lain yang juga berpendapat tentang asal usul agama adalah **M. Crawley**. Teori asal usul agama yang dikemukakan Crawley disebut dengan **Teori Masa Krisis Dalam Hidup Individu** (Koentjaraningrat, 1980: 220-222). Menurut Crawley manusia banyak mengalami situasi kritis dalam hidupnya. Ada perasaan takut yang menyertai manusia ketika melewati masa-masa itu. Situasi kritis itu antara lain berupa bencana sakit dan maut. Krisis-krisis itu tidak dapat di atasi dengan kepandaian, kekuasaan, dan bahkan kekayaan.

Dalam rentang kehidupan manusia ada masa-masa yang disebut dengan masa kritis. Masa kritis ini meliputi masa peralihan dari setiap tahapan kehidupan manusia. Masa kritis itu antara lain: peralihan dari masa kanak-kanak memasuki masa remaja, dari remaja memasuki masa dewasa, masa perkawinan, kehamilan, melahirkan, dan akhirnya maut. Untuk bisa melewati peralihan tahapan itu dengan selamat harus disertai dengan upacara-upacara keagamaan. Mengenai berbagai upacara daur hidup ini A. van Gennep menulis buku yang berjudul *Rites de Passages* (1909). Upacara-upacara daur hidup itulah menurut Crawley yang merupakan pangkal dari agama.

Teori asal usul agama juga dikemukakan oleh **R.R. Marret (1866-1940)** dan **R.H. Codrington**. Teori Marret mengenai asal usul agama disebut **Teori Kekuatan Luar Biasa** (Koentjaraningrat, 1980: 223). Dalam bukunya yang berjudul *The Threshold of Religion* dikatakan bahwa pangkal segala kelakuan keagamaan adalah perasaan rendah terhadap gejala-gejala dan peristiwa-peristiwa yang dalam kehidupan sehari-hari menyimpang dari yang biasa (luar biasa). Sementara R.H. Codrington dalam bukunya *The Melanesians* (1891) menuliskan mengenai keyakinan orang Melanesia tentang suatu kekuatan gaib yang disebut *mana*. *Mana* adalah suatu daya yang bukan

bersifat bendawi, tetapi juga bukan bersifat ruhani dalam arti yang biasa; *mana* adalah daya atau kekuatan adikodrati dalam arti tertentu, daya yang menyimpang dari yang biasa, yang sekaligus bersifat adikodrati. Daya ini dapat menjadikan orang menjadi terhormat, ditakuti, akan tetapi juga dapat menjadikan sesuatu menjadi mengerikan atau menjijikkan, pokoknya berbeda dari yang biasa (Hadiwijono, 1985: 11-12). Orang yang memiliki *mana* adalah orang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya, dalam berkebun, dalam berburu atau dalam pekerjaan mencari ikan. Orang yang memiliki *mana* itu adalah orang yang berkuasa dan mampu memimpin orang lain.

Menurut Marret asal-usul agama berpangkal pada adanya *emosi* atau *getaran jiwa* yang timbul karena kekaguman manusia terhadap gejala-gejala yang luar biasa. Oleh manusia kekuatan yang luar biasa itu tidak dapat diterangkan dengan akalunya. Kekuatan-kekuatan alamiah itu disebut sebagai kekuatan *supernatural*. Keyakinan itu dan emosi keagamaan yang timbul karena adanya kekaguman pada yang *supernatural* serta segala tingkah laku upacara yang merupakan akibat selanjutnya adalah merupakan bentuk tertua dari agama. Bentuk agama semacam itu oleh Marret malahan dianggap lebih tua dari agama manusia yang menyembah makhluk halus dan ruh-ruh. Dengan kata lain kepercayaan ini lebih tua dari animisme. Itu sebabnya bentuk kepercayaan tertua yang diuraikannya itu disebut dengan *praanimisme*.

Emile Durkheim (1858-). Teori Durkheim mengenai asal usul agama disebut dengan **Teori Sentimen Kemasyarakatan** (Koentjaraningrat, 1980: 224-225). Dalam teorinya agama bukan berasal dari pikiran mengenai jiwa, tetapi adanya getaran jiwa yang timbul karena pengaruh sentimen kemasyarakatan. Sentimen kemasyarakatan ini berupa kompleks perasaan yang mengandung rasa terikat, ras bakti, dan rasa cinta terhadap masyarakatnya.

Emosi keagamaan yang timbul karena sentimen kemasyarakatan membutuhkan suatu objek tujuan. Objek emosi keagamaan itu bukan disebabkan karena sifat keluar biasa, melainkan adanya anggapan umum dalam masyarakat. Objek itu juga memiliki sifat keramat. Objek yang bersifat keramat (*sacre*) ini tidak lain adalah suatu lambang masyarakat. Pada suku-suku bangsa tertentu objek keramat sering berupa sejenis binatang, tumbuhan, atau berupa benda. Benda-benda keramat itu disebut dengan *totem*. *Totem* merupakan representasi dari masyarakat atau klan pemilik totem itu. Kontruksi dari totem akan melahirkan: upacara, kepercayaan, dan mitologi. Agama menurut E. Durkheim ini bersifat *totemistik*.

Andrew Lang (1844-1912) juga berpendapat tentang asal usul agama. Teori Lang mengenai asal usul agama disebut **Teori Firman Tuhan** (Koentjaraningrat, 1980: 224-225). Ia menguraikan dalam bukunya yang berjudul *The Making Religion* mengenai *folklore* dan mitologi suku-suku bangsa di berbagai daerah. Dalam dongeng-dongeng mitologi itu, Lang sering menemukan adanya tokoh dewa yang oleh suku-suku bangsa tersebut dianggap dewa tertinggi. Dewa itu dipandang sebagai pencipta seluruh alam semesta beserta isinya, penjaga ketertiban alam dan kesusilaan.

Keyakinan kepada tokoh dewa seperti itu menurut Lang terutama terdapat pada suku-suku bangsa yang masih rendah sekali tingkat kebudayaannya. Mereka masih hidup dengan cara berburu dan meramu. Beberapa hal membuktikan bahwa keyakinan itu tidak timbul sebagai akibat pengaruh agama Nasrani atau Islam. Maka berdasarkan itu, Andrew Lang berkeyakinan bahwa keyakinan terhadap adanya dewa tertinggi dalam agama-agama *primitif* tersebut sudah amat tua dan mungkin merupakan bentuk agama manusia yang tertua. Karena beberapa sebab, keyakinan itu tergeser oleh keyakinan kepada

makhluk-makhluk halus lain seperti dewa-dewa alam, ruh nenek moyang, hantu dan lain-lain (Pritchard, 1984:26-62).

Pendapat tentang monoteisme sebagai bentuk kepercayaan yang paling tua dikemukakan pula oleh Wilhem Schmidt. Ia antara lain melakukan penyelidikan pada suku-suku Pigmi di Afrika, Indian di Amerika Utara, dan suku-suku di Australia. Ia menyatakan bahwa Wujud Agung (*Supreme Being*) dari kultur primitif adalah sebenarnya Tuhan dari monoteisme, dan bahwa agama yang memasukkan Dia itu adalah *monoteisme yang murni* (Ali, 1971: 16).

D. Unsur-unsur Pokok Agama

Secara umum Joachim Wach mengemukakan adanya tiga unsur pokok ungkapan pengalaman keagamaan. Ketiga pokok ungkapan pengalaman itu adalah ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran, tindakan, dan persekutuan. Ungkapan pengalaman keagamaan dalam bentuk pemikiran yang paling penting menurutnya terdapat dalam mite. Dikatakan oleh Langer di dalam mite konsepsi manusia tentang Tuhan menjadi benar-benar jelas. Cara lain ungkapan dalam bentuk pemikiran dapat ditemukan dalam doktrin-doktrin keagamaan. Doktrin merupakan penjelasan sistematis tentang keyakinan dan norma-norma keagamaan.

Penampakan ungkapan pengalaman keagamaan yang bercorak tindakan atau praktik terlihat dalam bentuk ritual atau peribadatan. Apa yang dipahami sebagai realitas tertinggi akan disembah melalui suatu tingkah laku pemujaan. Melalui ritus itu, manusia berusaha melakukan komunikasi dengan Tuhan dan menetralisasi kekurangan-kekurangan dirinya yang kotor. Dengan kata lain ritual atau peribadatan merupakan mekanisme untuk melakukan penyucian.

Kedua ungkapan di atas memberikan arah kepada adanya komunitas bersama yang diikat oleh suatu keyakinan. Sekalipun

perbuatan keagamaan senantiasa merupakan perbuatan individual, menurut Marret yang memiliki pengalaman keagamaan adalah masyarakat agama. Kelompok umat beragama merupakan penanggung jawab utama dari perasaan, pemikiran, dan perbuatan keagamaan (Wach, 1984: 89-216).

Versi lain mengenai unsur-unsur pokok agama meliputi beberapa aspek sebagai berikut.

1. Emosi keagamaan.

Emosi keagamaan atau *religious emotion* adalah suatu getaran jiwa yang muncul dalam diri seseorang sebagai respon terhadap kehadiran sesuatu yang luar biasa dalam dirinya. Emosi keagamaan menyebabkan manusia mempunyai sikap yang serba agamis, dan merupakan suatu getaran yang menggerakkan jiwa manusia. Emosi keagamaan menyebabkan setiap perbuatan yang dilakukan seorang beragama mempunyai nilai suci atau *sacred value*.

Rudolf Otto mengatakan bahwa emosi keagamaan itu berupa sikap kagum dan terpesona terhadap sesuatu yang gaib serta keramat. Sedang Soderblom menyebutkan bahwa emosi keagamaan adalah sikap percaya campur takut kepada sesuatu yang gaib serta keramat. Sementara menurut Koentjaraningrat, komponen emosi keagamaan ini merupakan komponen utama dalam setiap agama, yang akhirnya akan membedakan agama dengan semua sistem sosial budaya dalam masyarakat manusia.

2. Sistem keyakinan.

Sistem keyakinan dalam suatu agama terwujud dalam pikiran dan gagasan manusia, yang menyangkut keyakinan dan konsepsi manusia tentang Tuhan, sifat-sifat Tuhan, wujud alam gaib, terjadinya alam dan dunia, tentang akhirat, tentang ruh-ruh dan makhluk-makhluk gaib lainnya. Kecuali itu sistem keyakinan juga menyangkut sistem nilai dan sistem norma, yaitu berupa ajaran kesusilaan dan ajaran-

ajaran keagamaan lainnya yang mengatur tingkah laku manusia.

Sistem keyakinan tersebut biasanya terkandung dalam kitab-kitab suci dan buku-buku keagamaan. Kitab suci dan buku keagamaan itu biasanya memuat ajaran-ajaran pokok keagamaan, tafsiran dan penguraiannya. Kitab suci juga berisi dan memuat ceritera-ceritera yang melukiskan kehidupan makhluk-makhluk gaib dan juga manusia.

3. Sistem ritus dan upacara keagamaan.

Sistem ritus dan upacara keagamaan terwujud dalam aktivitas dan tindakan manusia dalam melaksanakan pengabdian dan kebaktiannya kepada Tuhan dan dalam usahanya untuk berkomunikasi dengan-Nya. Ritus atau upacara keagamaan ini biasanya berlangsung berulang-ulang, baik setiap hari, setiap minggu, bulanan atau pada waktu-waktu tertentu yang sudah ditentukan. Hal ini tergantung dari isi acaranya, suatu ritus keagamaan terdiri dari suatu kombinasi yang merangkaikan beberapa tindakan seperti berdoa, bersujud, berkorban, makan bersama, berpuasa dan lain-lain.

4. Peralatan dan tempat pelaksanaan ritus keagamaan.

Dalam ritus dan upacara keagamaan biasanya dipergunakan macam-macam sarana dan peralatan, seperti tempat atau gedung untuk pelaksanaan upacara (masjid, langgar, gereja, pagoda) dan peralatan lainnya seperti, bedug, gong, gamelan suci pakaian suci (jubah, mukena, dan lain-lain). Tempat upacara adalah suatu tempat yang dikhususkan dan yang biasanya tidak boleh didatangi dengan sembarangan. Tempat-tempat upacara itu ada yang bersifat individual dan komunal. Tempat upacara yang bersifat individual umumnya berada di rumah-rumah, sedangkan yang bercorak komunal ada di tengah atau sekitar desa.

Pada saat seseorang melakukan upacara atau ritual keagamaan, biasanya menggunakan sarana dan cara-cara tertentu yang sudah diatur dalam agamanya. Sarana itu antara lain berkaitan dengan pakaian yang harus dipakai, seperti sarung, kopiah, mukena, sajadah dan seterusnya. Untuk melengkapi ritual juga digunakan penanda waktu atau alat-alat lain, seperti gedug, kentongan, seperangkat alat gamelan dan lain-lain.

5. Kelompok pemeluk.

Kelompok pemeluk suatu agama biasanya disebut umat. Pada komponen yang kelima inilah terlihat semua aktivitas keagamaan secara keseluruhan. Komponen yang berupa emosi keagamaan, keyakinan keagamaan dan norma keagamaan, peribadatan atau ritual keagamaan, dan semua perlengkapan peribadatan, akan terwujud secara jelas dalam perilaku para pemeluk agama. Dengan tiadanya pemeluk atau penganut, suatu agama tidak akan ada artinya.

E. Klasifikasi Agama

Ada pelbagai klasifikasi agama yang dibuat oleh para ahli. Tetapi harus dipahami bahwa pembuatan klasifikasi tersebut tidaklah bersifat mutlak. Boleh jadi model klasifikasi tertentu memperlihatkan kecenderungan keagamaan yang dimiliki pembuatnya. Oleh karena itu, suatu klasifikasi bisa saja tidak dapat diterima secara umum oleh semua pengikut agama. Sebagai contoh dikemukakan di sini model klasifikasi Al-Masdoosi. Dalam bukunya *Living Religion of the World* al-Masdoosi mengklasifikasikan agama ke dalam: 1. *revealed and non-revealed religion*; 2. *missionary and nonmissionary religion*; dan 3. *geographical-racial religion* (Anshari, 1986: 117-119).

1. Revealed and Non-revealed Religion

Revealed religion (agama wahyu) adalah agama yang menghendaki iman kepada Tuhan, kepada para rasul-Nya dan kepada kitab-kitab-Nya serta pesan-Nya untuk disebarakan kepada segenap umat manusia. Sebaliknya *non-revealed religion* (agama bukan wahyu) adalah agama yang tidak memandang esensial penyerahan manusia kepada tata aturan Ilahi. Menurut Al-Masdoosi yang termasuk agama wahyu adalah agama Yahudi, Kristen, dan Islam. Di luar ketiga agama itu, seperti agama Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu dan lain-lain, termasuk pada agama-agama bukan wahyu. Agama-agama wahyu di atas umumnya diturunkan pada ras Semit, sedang agama nonwahyu lahir dan berkembang di luar ras Semit.

Ciri-ciri yang membedakan di antara kedua kelompok agama ini adalah seagai berikut.

a. Ciri-ciri agama wahyu, yaitu:

- 1) secara pasti dapat ditentukan lahirnya, dan bukan tumbuh dari masyarakat, melainkan diturunkan kepada masyarakat;
- 2) disampaikan oleh manusia yang dipilih Allah sebagai utusan-Nya. Utusan itu bukan menciptakan agama, melainkan menyampaikannya;
- 3) memiliki kitab suci yang bersih dari campur tangan manusia;
- 4) ajarannya serba tetap, walaupun tafsirannya berubah sesuai dengan kecerdasan dan kepekaan manusia;
- 5) konsep ketuhananya adalah monoteisme mutlak (*tauhid*); dan
- 6) kebenarannya adalah universal yaitu berlaku bagi setiap manusia, masa dan keadaan.

b. Ciri-ciri agama nonwahyu adalah:

- 1) tumbuh secara kumulatif dalam masyarakat penganutnya;

- 2) tidak disampaikan oleh utusan Tuhan (rasul Tuhan);
- 3) umumnya tidak memiliki kitab suci, kalāupun ada banyak mengalami perubahan-perubahan dalam perjalanan sejarahnya;
- 4) ajarannya dapat berubah-ubah, sesuai dengan perubahan akal pikiran masyarakatnya (penganutnya);
- 5) konsep ketuhananya dinamisme, animisme, politeisme, dan paling tinggi adalah monoteisme ninsbi; dan
- 6) kebenaran ajarannya tidak universal dan tidak berlaku umum.

2. Missionary dan nonmissionary

Dilihat dari segi misi (dakwah), agama dibagi ke dalam agama *missionary* (agama dakwah) dan *nonmissionary* (tidak didakwahkan). Thomas W. Arnold memasukkan Buddhisme, Kristen dan Islam pada golongan agama *missionary* (dakwah). Sedangkan Yudaisme atau Yahudi, Brahmanisme dan Zoroasterianisme dimasukkan pada *nonmissionary* (Arnold, 1981: 1).

Sehubungan dengan hal di atas Al-Masdoosi memberikan catatan bahwa menurut pendapatnya, baik agama Nasrani dan Buddhisme, ditinjau dari segi ajarannya yang asli bukanlah tergolong pada agama *missionary*, sebagaimana juga agama-agama lainnya selain Islam. Jadi menurut kesimpulan al-Masdoosi hanya Islam sajalah ajarannya yang asli merupakan agama *missionary*. Namun, dalam perkembangannya ternyata bahwa baik agama Nasrani dan Buddhisme menjadi agama *missionary*.

3. Ras dan Geografis

Ditinjau dari segi ras dan geografisnya, agama-agama didunia dapat dibagi menjadi:

- a. Agama ras semit: Yahudi, Nasrani, dan Islam. Ketiga agama ras Semit ini pada mulanya lahir dan berkembang di kawasan Timur Tengah.
- b. Agama ras Arya: Hinduisme, Jainisme, Sikhisme dan Zoroaster. Agama dalam kelompok ras Arya lahir dan berkembang pertama kali di kawasan Asia Selatan dan Tengah.
- c. Agama ras Mongolian: Confusianisme, Taoisme, dan Sintoisme. Agama-agama ras Mongolian lahir dan berkembang di kawasan Asia Timur dan Asia Tenggara. Sedangkan agama Buddha merupakan gabungan dari ras Arya dan Mongolian.

Model klasifikasi agama yang lain dikemukakan oleh Mc Gee. Agama-agama dikelompokkan oleh Mc Gee ke dalam kelompok agama dengan corak monoteisme, politeisme, agama etika (*ethical religion*), agama nenek moyang (*ancestral religion*), dan agama primitif.

Kelompok *monoteisme* terdiri atas Yahudi, Islam, dan Kristen. Masuk dalam *politeisme* adalah Hindu. Agama Buddha, Konghucu, dan Tao dimasukkan ke dalam kelompok *agama etika*. Sementara yang masuk dalam *agama nenek moyang* adalah Shinto. Kelompok *animisme* adalah agama-agama yang mempercayai adanya ruh-ruh. Penganut animisme percaya bahwa kekuasaan sakral berdiam pada suatu objek yang berupa tumbuhan, binatang, atau benda-benda tertentu.

Satu model klasifikasi yang lain dikemukakan oleh Muhammad Fazl-ur-Rahman Ansari. Dalam bukunya yang berjudul *Konsepsi Masyarakat Islam Modern*, ia membuat klasifikasi agama dengan mengurutkan agama dari yang terendah sampai yang tertinggi. Menurutny ada empat kelompok agama:

- a. Agama yang tidak diwahyukan dengan tingkat yang vulgar atau primitif. Termasuk dalam kelompok ini adalah Shintoisme. Ciri utama dari agama ini adalah pemujaan alam dan bersifat magis.
- b. Agama yang tidak diwahyukan dari tingkat yang beradab. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama Hindu dan Buddha. Ciri utama dari agama ini adalah politeisme dan *mystico-philosophical*.
- c. Agama yang diwahyukan tetapi palsu dan tidak otentik. Termasuk dalam kelompok ini agama Nasrani dan Yahudi. Ciri utamanya adalah monoteisme relatif dan rasial.
- d. Agama yang diwahyukan dan ada dalam bentuk yang murni dan otentik. Termasuk dalam kelompok ini adalah agama Islam. Ciri utamanya adalah monoteisme mutlak (Anshari, 1986: 93-101).

F. Agama Sebagai Fitrah Manusia

Apabila mengamati fenomena kehidupan umat manusia, akan kita dapati suatu kenyataan bahwa mereka adalah para pemeluk dari suatu agama tertentu. Mereka terdiri dari pemeluk agama seperti Yahudi, Nasrani, Islam, Hindu, Buddha, Shinto, Konghucu, Tao, dan lainnya. Dalam kenyataannya yang demikian menunjukkan bahwa manusia membutuhkan agama. Agama menempati kedudukan yang penting dalam kehidupan manusia.

Pada saat yang sama ketika realitas menunjukkan bahwa agama dipeluk oleh hampir seluruh umat manusia, dapat dikatakan bahwa agama merupakan fenomena yang bersifat universal. Banyak dan beragamnya agama yang dipeluk umat manusia, sejak dari masyarakat yang kehidupannya sangat bersahaja, seperti suku-suku terasing atau primitif sampai masyarakat yang berperadaban modern, telah memperkuat dan menjadi bukti dari

fenomena ini. Keberadaan manusia dan agama merupakan dua realitas yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Adanya pasangan dan ikatan antara manusia dan agama diperkuat oleh sejumlah peneliti keagamaan. Menurut F.J. Moreno sejarah agama telah ada sejak masa-masa yang paling awal dalam kehidupan manusia, agama berumur setua dengan sejarah manusia. Menurutnya pula, tidak ada suatu masyarakat manusia yang hidup tanpa suatu bentuk agama (Moreno, 1985: 121). Lebih jauh dikatakan oleh Max Muller, seorang sejarawan agama, yang pendapatnya kemudian dipetik oleh Joachim Wach, mengatakan bahwa sejarah umat manusia adalah sejarah agama. Agama menurutnya merupakan cara-cara yang sangat indah, yang telah dipergunakan secara bersama-sama oleh aneka umat manusia di jagad raya ini untuk meningkatkan pengetahuan dan cintanya yang mendalam kepada Tuhan. Agama menjadi rantai yang kokoh bagi keseluruhan mata rantai sejarah yang profan. Agama merupakan cahaya, jiwa dan kehidupan sejarah. Tanpa agama sejarah akan benar-benar profan (sekuler) (Wach, 1984: LVI).

Menurut H.M. Rasyidi, telah diakui oleh para sarjana bahwa agama adalah suatu hal yang disebut sebagai "*problem of ultimate concern*", yaitu suatu problem mengenai kepentingan mutlak dari kehidupan manusia. Ia mengatakan, jika seseorang membicarakan soal agamanya, maka ia tidak dapat tawar menawar, apalagi berganti; agama bukan seperti rumah atau pakaian yang kalau perlu dapat diganti. Akan tetapi sekali seseorang memeluk suatu agama, tak dapatlah agama itu terpisah dari diri seseorang (Natsir, 1983:265). Ia pun mengutip pendapat Paul Tillich yang menyatakan bahwa setiap manusia dalam keadaan *involved* (terlibat) dengan agamanya.

Seorang sosiolog, J. Milton Yinger, mengatakan bahwa agama menjadi tempat rujukan karena memiliki makna yang mutlak. Kemutlakan makna yang dimilikinya menjadi dasar bagi tujuan dan aspirasi manusia. Agama memberikan sumbangan

kepada manusia saat menghadapi situasi kritis, pada saat manusia menghadapi ketidakpastian dan ketidakberdayaan. Agama memberikan jawaban terhadap masalah makna yang mutlak dalam kehidupan manusia (O'Dea, 1985: 30-31). Menurut setiap orang memerlukan nilai-nilai mutlak sebagai pegangan hidupnya, dan bahwa nilai-nilai itu merupakan jawaban terhadap persoalan terakhir mengenai hidup dan mati.

Memperhatikan beberapa pendapat di atas, dapat dikatakan bahwa agama merupakan suatu fenomena yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dorongan dalam diri manusia untuk beragama atau bertuhan (karena Tuhan merupakan pusat atau inti hidup keagamaan) merupakan naluri atau pembawaan alamiahnya. Menurut Quraish Shihab keberagamaan adalah *fitrah*, yaitu sesuatu yang melekat pada diri manusia dan terbawa sejak kelahirannya (Shihab, 2013: 375). Untuk menguatkan pendapatnya ia mengutip ayat Alquran pada surat al-Rum, 30: 30, "Fitrah Allah yang menciptakan manusia atas fitrah itu". Dengan demikian, manusia tidak dapat melepaskan diri dari agama. Tuhan menciptakan demikian, karena agama merupakan kebutuhan hidupnya.

Menunjuk akan adanya relasi yang demikian kuat antara manusia dan agama menyebabkan manusia disebut sebagai *homo religius*. Menurut Mircea Eliade, *homo religius* adalah tipe manusia yang hidup dalam suatu alam yang sakral, penuh dengan nilai-nilai keagamaan dan dapat menikmati sakralitas yang ada dan tampak pada alam semesta. Pengalaman dan penghayatan akan yang suci atau realitas mutlak (*ultimate reality*) selanjutnya akan mempengaruhi, membentuk, dan ikut menentukan corak serta cara hidupnya (Sastrapratedja, 1982: 38).

G. Peran dan Fungsi Agama

Sebagaimana tercermin dari arti yang melekat pada kata agama, *religion*, dan *al-din* di atas, agama secara keseluruhan

berarti serangkaian atau seperangkat aturan, ketentuan, dan kaidah-kaidah kehidupan yang harus dipegangi dan dijadikan rujukan atau petunjuk oleh setiap pemeluk dan penganutnya dalam menjalankan seluruh aktivitas kehidupannya. Aktivitas kehidupan ini tentu saja meliputi kegiatan dirinya sebagai pribadi maupun sebagai anggota dari suatu komunitas, dan ketika memegang peran-peran tertentu baik dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Cakupan aktivitas ini juga meliputi seluruh bidang kehidupannya tanpa kecuali, yang meliputi bidang sosial, ekonomi, budaya, dan politik. Dengan kata lain agama berperan sebagai petunjuk atau *hudan* bagi manusia, sehingga ia tidak tersesat untuk menuju atau mencapai tujuan yang hakiki dari kehidupan yang sedang dijalaninya.

Selain hal tersebut di atas, secara psikologis maupun sosiologis agama penting dalam kehidupan manusia, terutama pada saat ilmu dan teknologi tidak mampu menawarkan adaptasi atau mekanisme penyesuaian yang dibutuhkan. Einstein mengatakan bahwa penemuan benda-benda langit di angkasa merupakan rangsangan terhadap semangat keagamaan. Hal senada dikemukakan juga oleh Newton bahwa kegiatan-kegiatan ahli ilmu kealaman bersifat keagamaan, dan baginya hukum-hukum alam adalah hukum-hukum Tuhan juga (Nottingham, 1985: XI).

Secara psikologis dan sosiologis, fungsi agama memberikan cakrawala pandang yang lebih luas tentang Tuhan atau 'dunia lain' yang tidak terjangkau secara empirik. Fungsi psikologis maupun sosial yang diperankan oleh agama sangat mendasar. Dalam hubungan ini menurut Robert K. Merton agama memiliki dua fungsi, yaitu fungsi manifes (*manifest function*), yang disadari, disengaja; dan fungsi laten (*laten function*), tersembunyi, tidak disadari, tidak sengaja. Menyembah Tuhan adalah fungsi manifes, sedangkan memenuhi kebutuhan manusia (terutama yang lahiriah) merupakan fungsi laten dari agama.

Teori fungsional memandang sumbangan agama terhadap masyarakat dan kebudayaan berdasarkan karakteristik pentingnya, yakni transendensi pengalaman sehari-harinya. Dalam istilah Talcott Parsons manusia membutuhkan *referensi transendental*. Mengapa manusia membutuhkan referensi transendental? Paling tidak ada tiga karakteristik yang mendasarinya.

Pertama, manusia hidup dalam kondisi *ketidakpastian*. Manusia tidak bisa memberikan jaminan kepada dirinya sendiri tentang keamanan dan keselamatannya. *Kedua*, manusia hidup dalam kondisi *ketidakberdayaan*. Kesanggupan manusia untuk mengendalikan dan untuk mempengaruhi hidupnya, walaupun kesanggupan itu kian meningkat, pada dasarnya terbatas. *Ketiga*, manusia harus hidup dalam suatu tatanan masyarakat yang teratur dari berbagai fungsi, fasilitas, dan ganjaran. Di sini tercakup pembagian kerja dan produk. Dalam kondisi ini seseorang membutuhkan kondisi imperatif, yaitu suatu tingkat superordinasi dan subordinasi dalam hubungan manusia. Di sini manusia berada di tengah-tengah *kelangkaan*, yang merupakan ciri khas pokok ketiga eksistensi manusia. Kondisi kelangkaan menimbulkan deprivasi (kehilangan) relatif pada diri manusia (O'Dea, 1985: 7-8).

Secara lebih luas Thomas F. O'Dea menyebutkan enam fungsi agama sebagai berikut.

1. Agama menyajikan dukungan moral dan sarana emosional, pelipur lara, dan rekonsiliasi di saat manusia menghadapi ketidakpastian dan frustrasi.
2. Agama menyajikan sarana hubungan transendental melalui amal ibadat, yang menimbulkan rasa damai dan identitas baru yang menyegarkan.
3. Agama mengesahkan, memperkuat, memberi legitimasi dan mensucikan nilai dan norma masyarakat yang telah mapan,

dan membantu mengendalikan ketenteraman, ketertiban, dan stabilitas masyarakat.

4. Agama memberikan standar nilai untuk mengkaji ulang nilai-nilai dan norma-norma yang telah mapan.
5. Agama memberikan fungsi identitas diri.
6. Agama memberikan status baru dalam pertumbuhan dan siklus perkembangan individual melalui berbagai krisis rites (Djamari, 1988: 81).

Dari penjelasan mengenai sejumlah fungsi agama yang dikemukakan di atas, sedikitnya ada dua hal yang pokok. *Pertama*, agama merupakan suatu cakrawala tentang dunia yang tidak terjangkau manusia (*beyond*), dalam arti ketika deprivasi (rasa kehilangan diri) dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang memiliki makna. *Kedua*, agama merupakan sarana yang memungkinkan hubungan antara manusia dengan Tuhan, yang memberikan jaminan dan keselamatan.

H. Penutup

Perbincangan tentang manusia dan agama akan terus berlanjut seiring perkembangan zaman. Sejak zaman filosof Yunani Kuno perbincangan tentang manusia dan agama sudah dimulai dan bergulir hingga sekarang. Ironinya adalah meskipun manusia menjadi subjek sekaligus objek langsung terkait dengan perbincangan ini, tidak sedikit manusia yang tidak menyadari jati dirinya yang hakikinya tidak bisa terpisah dengan agama.

Di era modern sekarang banyak manusia yang mulai meninggalkan agama lantaran agama tidak memberikan kepuasan kepadanya. Agama bahkan dijadikan "biang kerok" atas terjadinya persoalan-persoalan kemanusiaan modern. Tentu ini adalah kesalahan besar. Dengan memahami makna manusia dan makna agama, manusia sebenarnya akan diarahkan pada penyadaran diri bahwa dirinya memang harus beragama. Agama seharusnya dapat

c. mengarahkan manusia dalam kehidupannya sehingga manusia teratur dalam hidupnya. Ketika manusia yang beragama menunjukkan ketidakteraturan dalam hidupnya, berarti manusia telah salah dalam menerapkan ajaran agamanya. *Wallahu A'lam.*

BAB XII

SISTEM EKONOMI ISLAM

Oleh: Ajat Sudrajat

A. Pendahuluan

Alquran menjelaskan bahwa apa yang ada di langit dan di bumi itu disediakan untuk keperluan manusia. Dalam surat Luqman ayat 20 Allah Swt. menyatakan: "Tidakkah kamu perhatikan, bahwa Allah telah memudahkan (menyediakan) bagi kamu apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi, dan dicukupkanNya karunia-Nya baik yang lahir maupun yang batin" (Q.S. Luqman (31): 20).

Ditegaskan pada ayat di atas bahwa apa yang ada dalam alam ini tidak disediakan begitu saja, *ready for consumption*, siap untuk dipakai oleh manusia. Kecuali udara, hampir semua barang untuk keperluan hidup manusia harus disiapkan dulu olehnya dari bahan-bahan mentah sampai siap untuk dimakan atau dipakai, yaitu dengan mempergunakan akal dan tenaga, yang akhirnya membawa manusia kepada prinsip dan motif ekonomi.

Sjafruddin Prawiranegara (1988:263) menyatakan bahwa

fundamen dari suatu sistem ekonomi, apa pun sistem ekonomi yang dianut, termasuk sistem ekonomi Islam, terdiri dari dua bagian, yaitu: (1) tiap-tiap sistem ekonomi tujuannya adalah memenuhi keperluan hidup masyarakat, baik perseorangan maupun masyarakat secara keseluruhan, dan (2) tiap-tiap sistem ekonomi bekerja menurut prinsip yang dinamakan prinsip atau motif ekonomi.

Menurut prinsip atau motif ekonomi, tiap-tiap orang atau masyarakat tidak mau bekerja lebih berat atau lebih lama daripada yang semestinya dalam memenuhi keperluannya, dengan kata lain tiap-tiap orang atau masyarakat akan berusaha mencapai hasil yang sebesar-besarnya dengan biaya yang serendah-rendahnya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Perbedaan di antara mereka adalah keperluan-keperluan yang harus dipenuhi. Keperluan-keperluan tersebut berbeda dari satu orang dengan lainnya, dari satu masyarakat dengan masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan tersebut disebabkan oleh berbagai faktor, seperti keadaan alam, iklim, susunan tanah, keadaan air, dan lain sebagainya; atau perbedaan tersebut, dikarenakan fakto-faktor yang ada dalam masyarakat, seperti kebiasaan, budaya, agama, dan lain-lain. Perbedaan-perbedaan itu akhirnya akan membawa seseorang atau masyarakat kepada pelaksanaan prinsip-prinsip ekonomi.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, bahwa prinsip ekonomi yang menyatakan 'mencapai hasil sebesar-besarnya dengan biaya sekecil-kecilnya, dan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya' adalah suatu prinsip yang bekerja menurut ukuran-ukuran akal atau rasio. Sementara itu, rasio hanya mau menerima nilai-nilai yang dapat diukur dan ditimbang secara kuantitatif. Oleh karena itu, apabila prinsip atau motif ekonomi di atas tidak dibatasi

oleh syarat-syarat moral dan sosial, maka manusia bisa menjadi binatang buas.

B. Sistem Ekonomi Islam

Apabila memperhatikan Alquran dan Hadis, meskipun ajaran Islam mengakui motif atau prinsip mencari keuntungan seperti yang ditegaskan di atas, tetapi Islam mangikat motif atau prinsip itu dengan syarat-syarat moral, sosial, dan *temperance* (pembatasan diri). Oleh karena itu, apabila ajaran itu dilaksanakan, pemakaian motif keuntungan oleh seorang individu tentu tidak akan membawa kepada individualisme yang ekstrem, yang hanya ingat akan kepentingan diri sendiri tanpa mempedulikan pihak lain. Sistem ekonomi Islam, dengan demikian, merupakan suatu imbangan yang harmonis antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Menurut suatu hadis yang berasal dari Ibn Abbas r.a. diriwayatkan oleh Al-Bukhari, Rasulullah saw. bersabda kepada Muadz yang diutus ke negeri Yaman untuk mengajarkan Islam:

Sahabat Muadz diutus oleh Rasulullah saw. ke Yaman. Rasulullah saw. bersabda: 'Dakwahkanlah mereka kepada 'syahadat' bahwa sesungguhnya tidak ada Tuhan melainkan Allah dan sesungguhnya saya (Muhammad saw.) Rasulullah. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati syahadat, maka beritahukanlah mereka bahwa sesungguhnya Allah Swt. mewajibkan salat lima waktu setiap hari. Kalau mereka (orang Yaman) mentaati (salat) ajarkanlah bahwa sesungguhnya Allah memerintahkan membayarkan sedekah (zakat) pada harta mereka diambil dari yang kaya di antara mereka dan diberikan kepada mereka yang miskin. Jika mereka mematuhi yang demikian dan juga engkau, (maka jagalah) supaya yang dibayarkan sebagai zakat itu adalah yang paling baik dari harta mereka. Takutlah doa si

teraniaya, sebab doa mereka itu dan Allah, tidak ada penghalang (H.R. Al-Bukhari).

Hadis di atas menegaskan bahwa manusia boleh berusaha dan menikmati hasil usahanya, tetapi pada saat yang sama, ia harus ingat dan memberikan sebagian dari hartanya kepada mereka yang tidak mampu. Harta yang diberikannya pun harus diperhatikan, yaitu sesuatu yang baik dan berharga.

Dalam hadis yang lain Hakim bin Hizam r.a. meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda:

Wahai Hakim, sesungguhnya harta ini hijau sedap dipandang mata lagi manis. Barangsiapa mengambilnya dengan perasaan tidak loba, Allah akan memberkatinya; dan siapa yang mengambilnya dengan rasa loba dan tamak, tidak akan didapatinya pada hari itu keberkatan, seperti orang makan tidak merasa kenyang. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah (H.R. Al-Bukhari).

Hadis di atas menegaskan tentang ketamakan dan kerakusan yang menjadi penyakit manusia. Ia selalu ingin mendapatkan jauh lebih banyak dari apa yang dapat dimakan oleh perut dan dipakai oleh badan. Padahal justru kerakusan itulah yang akan membinasakan jiwa dan masyarakat. Dari dalil di atas, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa sistem ekonomi Islam adalah sistem ekonomi, baik pada tataran normatif maupun aplikasinya, didasarkan pada Alquran dan Sunnah, dalam rangka menjamin terwujudnya kesejahteraan bersama.

C. Dasar Filosofis Ekonomi Islam

Setiap sistem ekonomi, termasuk sistem ekonomi kapitalis, sosialis, maupun Islam, masing-masing tersusun dari seperangkat nilai yang membentuk dan membangun kerangka organisasi

kegiatan ekonominya. Nilai-nilai tersebut memiliki hierarki tertentu, yang terlihat dalam hubungan-hubungan nilai dan interaksinya, sehingga akan menentukan eksistensi sistem ekonomi tersebut.

Pada dasarnya sistematika hierarki nilai dari setiap sistem ekonomi adalah sama, yang membedakan di antara mereka adalah '**substansi**' nilai tersebut, yang ditentukan oleh agama atau aliran pemikiran tertentu. Menurut AM Saefuddin (2008: 10), hierarki suatu sistem ekonomi meliputi tiga hal, yaitu: (1) filsafat sistem, (2) nilai dasar sistem, dan (3) nilai instrumental sistem.

Pada wilayah filsafat sistem, yang menjadi fokusnya adalah hal-hal yang menjadi dasar (*almabda al-asasiyyah*) dari suatu sistem dengan mendasarkan kepada suatu doktrin atau pandangan hidup yang dianutnya. misanya, menyakut pola hubungan antara Tuhan, manusia, dan alam. Dari doktrin atau pandangan hidup yang bersifat filosofis itu akan diturunkan nilai-nilai dasar sistem yang akan menjadi basis kerangka sosial, legal, dan tingkah laku. Selanjutnya, akan diturunkan menjadi nilai-nilai instrumental sistem yang berupa perangkat aturan yang akan menjamin keterlaksanaan sistem tersebut dapat bekerja dengan baik.

Pada tataran **filsafat sistem** ekonomi Islam, pola hubungan antara Allah, manusia, dan alam terlihat dengan jelas. Ekonomi Islam, dalam hal ini, memiliki sifat dasar sebagai ekonomi *rabbani* dan *insani* (Hulwati, 2009:1-4). Dikatakan ekonomi *rabbani*, karena ekonomi Islam sarat dengan tujuan dan nilai-nilai *ilahiyah*; dan dikatakan bersifat *insani*, karena sistem ekonomi Islam dilaksanakan dan ditujukan untuk kemaslahatan manusia. Hal ini dapat dipahami melalui konsep-konsep dasar yang mengilhami ekonomi Islam, yaitu konsep *tauhid*, *rububiyah*, *khalifah*, dan *tazkiyah*. ✓

Konsep tauhid. Dalam filsafat sistem ekonomi Islam, alam semesta, berupa langit, bumi, dan semua yang terdapat di dalamnya, bahkan apa pun yang dikuasai manusia, adalah milik Allah. Allah dalam Islam ditempatkan sebagai pemilik mutlak karena Dialah yang menciptakan alam semesta beserta seluruh isinya dan mengaruniakannya kepada manusia (Q.S. al-Anbiya (20): 6; al-Maidah (5):120). Posisi manusia dalam pola hubungan ini adalah sebagai *khalifah* (Q.S. al-Baqarah (2):30) yang diberi hak dan tanggung jawab mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya.

Filsafat sistem ekonomi Islam, dengan demikian, telah menegaskan suatu pandangan hidup yang telah menempatkan Allah Swt. sebagai titik berangkat dan titik untuk kembali dari segala masalah, termasuk bidang ekonomi (Q.S. al-Baqarah (2):156). Dengan kata lain, Islam telah memperkenalkan konsep *teosentrisme* bukan *antroposentrisme*. Akan tetapi seandainya akan menempatkan konsep *antroposentrisme*, maka coraknya adalah *antroposentrisme Islami* yang menempatkan manusia sebagai *khalifatullah fi al-ardli*.

Konsep rububiyah. Dalam konsep yang kedua ini ditekankan pada fungsi manusia dalam menciptakan tatanan sosial dan perilaku ekonomi yang sesuai dengan ketentuan Allah. Manusia dalam perilaku ekonominya tidak dapat tidak harus menghormati seperangkat nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi kepemilikan, pengalokasian, dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi.

Konsep khalifah. Sebagaimana telah dinyatakan di atas, posisi manusia dalam pola hubungan ini adalah sebagai *khalifah* (Q.S. al-Baqarah (2):30) yang diberi hak dan tanggung jawab mengurus dan memanfaatkannya untuk kepentingan dan kelangsungan hidupnya. Manusia sebagai khalifah tidak boleh

berbuat semaunya, karena ia mendapat amanah untuk menjaga hak masyarakat yang berhubungan dengan kepemilikan.

Konsep tazkiyah. Konsep ini merupakan konsep yang membentuk kesucian jiwa dan ketinggian akhlak. Konsep ini berkaitan erat dengan aplikasi ekonomi Islam yang harus dilandaskan pada prinsip keadilan, kebajikan, kearifan, dan kesejahteraan.

Seperti telah dinyatakan di atas, dalam perilaku ekonomi, tidak dapat tidak seseorang harus menghormati seperangkat nilai dasar yang akan mempengaruhi bentuk dan substansi dari organisasi kepemilikan, pengalokasian, dan tingkah laku dari para pelaku ekonomi. Diantara **nilai-nilai dasar** sistem ekonomi Islam adalah:

Pertama, kepemilikan. Dalam nilai dasar ini, kepemilikan oleh manusia dilihat sebagai kepemilikan yang bersifat relatif, karena pemilik hakiki dari segala sesuatu adalah Allah Swt. (Q.S. al-Baqarah (2):107). Dengan demikian, setiap orang dalam Islam haruslah menyadari bahwa harta dan atau kekayaan yang dimilikinya bukanlah milik sepenuhnya, melainkan titipan atau amanah dari Allah. Oleh karena itu, dalam mendapatkan dan menggunakannya haruslah sesuai dengan ketentuan dari pemiliknya, yaitu Allah Swt.

Kedua, keadilan. Setiap orang Islam dituntut untuk menegakkan keadilan (Q.S. al-Maidah (5):8) dan menghormati hak orang lain. Mereka dituntut untuk memberikan setiap hak kepada para pemiliknya masing-masing tanpa melebihkan atau mengurangnya. Dengan demikian, dalam bidang ekonomi, seorang manusia dalam kehidupannya dituntut untuk menjauhi semua praktik kezhaliman (Q.S. 42:40), baik dalam mendapatkan maupun mengelola harta atau kekayaan.

Ketiga, persaudaraan dan kebersamaan. Manusia dalam pandangan Islam adalah bersaudara. Ia sama-sama diciptakan dari tanah (Q.S. al-An'am (6): 2) dan sama-sama keturunan Nabi Adam (Q.S. al-Nisa (4):1). Dengan demikian, setiap orang Islam dalam perilaku ekonominya harus menjunjung tinggi sikap kepedulian antara satu dengan lainnya, atau dengan kata lain menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan dan kebersamaan (Q.S. al-Hujurat (49): 10). Oleh karena itu, dalam perilaku ekonomi, seorang Muslim haruslah bisa berbuat sesuatu dengan hartanya yang akan mendorong bagi tumbuhnya rasa persaudaraan antara sesama dan tidak merusak dirinya dan orang lain (*la dharara wala dhirara*).

✓ Bagi terlaksananya nilai-nilai dasar di atas, Islam telah meletakkan beberapa nilai-nilai instrumental yang diperlukan, yaitu:

Pertama, kewajiban membayar zakat. Setiap orang yang memiliki harta yang telah sampai nisabnya dalam Islam diwajibkan untuk membayar zakat (Q.S. al-Baqarah (2): 43). Dalam pandangan Islam setiap harta yang dimiliki seseorang di dalamnya terdapat hak orang lain. Oleh karena itu, yang bersangkutan harus mengeluarkannya untuk diberikan kepada mereka yang berhak (Q.S. al-Taubah (9): 61).

Kedua, jaminan sosial. Islam memberikan jaminan terhadap tingkat dan kualitas hidup yang minimum bagi seluruh lapisan masyarakat (Q.S. al-Taubah (9): 6). Hal ini terlihat dari banyaknya ayat dalam Alquran yang menyuruh manusia untuk memperhatikan dan membantu fakir-miskin dan orang-orang yang mengalami kesulitan ekonomi (Q.S. al-Baqarah (2): 273; al-Taubah (9): 60). Disamping melalui perintah zakat, Islam juga sangat mendorong umat Islam untuk berinfak dan bersadaqah.

Ketiga, larangan riba. Larangan riba (Q.S. al-Baqarah (2):275-278) merupakan nilai instrumental yang terkait dengan pemberantasan praktik kezhaliman dan ketidakadilan di tengah-tengah masyarakat. Oleh karena itu, praktik riba yang bersifat eksploitatif tersebut dalam kehidupan harus dijaui dan dihindarkan.

Keempat, kerjasama ekonomi. Islam sangat mendorong dilakukannya kerjasama, termasuk dalam bidang ekonomi. Ini terlihat dari sejumlah ayat yang menyuruh manusia untuk saling tolong menolong dalam kebaikan dan taqwa (Q.S. al-Maidah (2): 3). Kerjasama tersebut bisa dilakukan baik secara syirkah, mudharabah, atau koperasi, yang intinya mendorong terciptanya produktifitas di tengah-tengah masyarakat (Q.S. al-Baqarah (2) 190), meningkatkan kesejahteraan (Q.S. Ali 'Imran (3): 103; al-Maidah (5): 3; al-Taubah (9): 71 dan 105), melindungi ekonomi lemah (Q.S. al-Nisa (4) 5-10, al-Fajr (89): 17-20), dan seterusnya.

Kelima, peran Negara. Islam menghormati mekanisme pasar, tetapi juga sekaligus memberikan peran kepada negara atau pemerintah untuk menegakkan keadilan (Q.S. al-Nisa (4): 57) dan mendorong para pelaku ekonomi berbuat baik dan mencegah mereka dari berbuat yang munkar (Q.S. al-Taubah): 112). Peran negara akan mengurangi terjadinya berbagai pelanggaran, seperti praktik penipuan, kecurangan, penimbunan, dan lain-lain. Peran negara juga diharapkan dapat membantu terciptanya pertumbuhan, pemerataan, dan stabilitas ekonomi di tengah-tengah masyarakat.

Menurut al-Farabi (Athoillah, t.th.: 79) dalam kitabnya tentang Negara Ideal digambarkan akan adanya bimbingan penguasa yang bijaksana terhadap rakyatnya dalam kerjasama yang sempurna. Al-Farabi menyadari akan terjadinya konflik, karena itu penguasa berkewajiban untuk mengontrol konflik

tersebut dan juga menganjurkan untuk menghindari keadaan ekstrem terlalu kaya atau terlalu miskin di tengah masyarakat.

Selanjutnya al-Ghazali (Athoillah, t.th.: 100) menegaskan bahwa agama adalah fondasi dan penguasa mewakili negara adalah pelindung, maka apabila salah satu dari tiang ini lemah maka masyarakat akan ambruk. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban untuk menegakkan keadilan, kedamaian, dan keamanan, serta stabilitas.

Agustianto (Sekjen Ikatan Ahli Ekonomi Islam Indonesia dan Dosen Fikih Muamalah Ekonomi Pascasarjana Universitas Indonesia) menegaskan bahwa filsafat ekonomi Islam merujuk pada **sepuluh nilai Islami**. Kesepuluh nilai itu adalah Tauhid, Mashlahah, adil, khilafah, persaudaraan, kerja keras dan produktivitas, kepemilikan, kebebasan dan tanggung jawab, jaminan sosial, dan nubuwwah.

Pilar pertama, tauhid. Tauhid merupakan fondasi utama seluruh ajaran Islam, juga merupakan filsafat fundamental dari ekonomi Islam (Q.S al-Zumar (39): 38). Hakikat tauhid juga dapat berarti penyerahan diri yang bulat kepada kehendak Ilahi, yang mendorong seluruh aktifitas kehidupan manusia berada dalam kerangka menciptakan pola kehidupan yang sesuai kehendak Allah.

Konsep tauhid mengajarkan dua ajaran utama dalam ekonomi. *Pertama*, semua sumber daya yang ada di alam ini merupakan ciptaan dan milik Allah secara absolut. Manusia hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola sumberdaya itu dalam rangka mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan kehidupan manusia secara adil berdasar syariah. *Kedua*, Allah menyediakan sumber daya alam yang sangat banyak untuk memenuhi kebutuhan manusia. Manusia yang berperan sebagai *khalifah*, dapat

memanfaatkan sumber daya yang banyak itu untuk kebutuhan hidupnya.

Selanjutnya konsep tauhid ini mengajarkan bahwa segala sesuatu bertitik tolak dari Allah, bertujuan akhir kepada Allah, termasuk dalam menggunakan sarana dan sumber daya harus disesuaikan dengan syariat Allah. Aktivitas ekonomi, seperti produksi, distribusi, konsumsi, ekspor - impor, idealnya harus bertitik tolak dari tauhid (keilahian) dan berjalan dalam koridor syariah yang bertujuan untuk menciptakan *falah* dan *ridha* Allah. "*Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu. Maka berjalanlah di segala penjurunya dan makanlah sebagian dari rezeki-Nya dan hanya kepada-Nya kami dikembalikan*" (Q.S. Al-Mulk: 15).

Prinsip kedua, mashlahah. Penempatan prinsip ini diurutan kedua karena *mashlahah* merupakan konsep yang paling penting dalam syariah, sesudah tauhid. *Mashlahah* adalah tujuan syariah Islam dan menjadi inti utama syariah Islam itu sendiri. Secara umum, *masalahah* diartikan sebagai kebaikan dunia dan akhirat. Para ahli *ushul fikih* mendefinisikannya sebagai segala sesuatu yang mengandung manfaat, kegunaan, kebaikan, dan menghindarkan mudharat, kerusakan dan mafsadah. *Maslahah* adalah upaya mewujudkan dan memelihara lima kebutuhan dasar, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Pilar ketiga, adil. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Alquran sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah (Q.S. Al-Hadid, 57: 25). Alquran secara eksplisit menekankan pentingnya keadilan dan persaudaraan tersebut. Menurut Umar Chapra, sebuah masyarakat Islam yang ideal mesti mengaktualisasikan keadilan dan persaudaraan secara bersamaan, karena keduanya merupakan dua sisi yang tak bisa dipisahkan. Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua

sumber daya yang menjadi amanat suci Tuhan, digunakan untuk mewujudkan *maqashid syariah*, yakni pemenuhan kebutuhan hidup manusia, terutama kebutuhan dasar, seperti sandang, pangan, papan, pendidikan dan kesehatan.

Persaudaraan dan keadilan juga menuntut agar sumberdaya didistribusikan secara adil kepada seluruh rakyat melalui kebijakan yang adil dan instrumen zakat, infaq, sedekah, pajak, kharaj, jizyah, cukai ekspor-impor dan sebagainya. Alquran dengan tegas mengatakan "*supaya harta itu tidak beredar di kalangan orang kaya saja di antara kamu*" (Q.S. al-Hashr (59):7); dan "*di antara harta mereka terdapat hak fakir miskin, baik peminta-minta maupun yang orang miskin malu meminta-minta*" (Q.S. Nuh, 70: 24).

Pilar keempat, khalifah. Dalam ajaran Islam, manusia diciptakan Allah untuk menjadi *khalifah* (wakil Allah) di muka bumi (Q.S. al-Baqarah (2):30; al-An'am (6):165); Tahir (35):39). Manusia telah diberkahi dengan semua kelengkapan akal, spiritual, dan material yang memungkinkannya untuk mengemban misinya dengan efektif. Fungsi kekhalifahan manusia adalah untuk mengelola alam dan memakmurkan bumi sesuai dengan ketentuan dan syariah Allah. Dalam mengemban tugasnya sebagai khalifah ia diberi kebebasan dan juga dapat berpikir serta menalar untuk memilih antara yang benar dan yang salah, fair dan tidak fair dan mengubah kondisi hidupnya ke arah yang lebih baik (Q.S. Ar-Ra'd (13): 11).

Konsep *khalifah* juga meniscayakan peranan negara dalam perekonomian. Peran penting tersebut antara lain memberikan jaminan sosial kepada masyarakat, jaminan pelaksanaan ekonomi Islam, serta kontrol pasar dan memastikan tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak orang lain dalam kegiatan bisnis

melalui lembaga hisbah. Peran negara dalam perekonomian tidak berarti bahwa Islam menolak mekanisme pasar sepenuhnya.

Pilar kelima, persaudaraan (ukhuwah). Alquran mengajarkan persaudaraan sesama manusia, termasuk dan terutama ukhuwah dalam perekonomian. Alquran mengatakan: *"Hai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal"* (Q.S. al-Hujurat (49):13); *"Kami menjadikan kamu dari diri yang satu"* (Q.S. al-Nisa (4):1). Dalam umat yang satu ini, antar orang beriman diminta untuk saling berbuat baik dan berlaku *i'tsar*, *"mereka lebih mementingkan orang lain dari diri mereka sendiri, sekalipun mereka dalam keadaan kesulitan"*. Dalam ayat lain Allah Swt. berfirman, *"orang bertaqwa itu memberikan harta yang ia cintai kepada karib-kerabat, anak yatim dan orang-orang miskin"*.

Implikasi logis dari prinsip ukhuwah adalah bahwa seluruh sumberdaya yang disediakan Allah harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok semua individu dan untuk menjamin standar hidup yang wajar dan terhormat bagi setiap orang. Nabi bersabda, *"Tidaklah beriman seseorang kamu, jika ia makan kenyang sementara tetangganya kelaparan"*. Karena sumber daya yang bisa dikuasai manusia terbatas, maka untuk mewujudkan filantropi tersebut, seorang muslim haruslah sederhana dalam mengkonsumsi sumber daya yang tersedia. Pemenuhan kebutuhan individu harus dilakukan dalam kerangka hidup sederhana, tidak boleh ada pemborosan, mubazzir atau israf.

Pilar keenam, kerja dan Produktifitas. Islam memang menganggap bahwa bekerja merupakan ibadah. Sebuah hadis menyebutkan bahwa bekerja adalah *jihad fi sabilillah*. Karena semua hal adalah milik Allah (Q.S. Al-Nur (24):33) maka manusia dianggap sebagai memegang hak milik relatif, artinya manusia

hanyalah sebagai penerima titipan, *trustee* (pemegang amanat) yang harus mempertanggungjawabkannya kepada Allah. Jadi, menurut ekonomi Islam, penguasaan manusia terhadap sumberdaya, faktor produksi atau asset produktif hanyalah bersifat titipan dari Allah yang harus dipertanggungjawabkan. Walaupun demikian Islam mengakui hak milik pribadi.

Baqir Al-Sadr misalnya berpendapat bahwa menurut ekonomi Islam, hak milik pribadi merupakan prinsip fundamental. Sedangkan hak milik umum merupakan prinsip *taban* (pengecualian). Artinya setiap manusia memiliki hak asasi secara pribadi terhadap segala sumberdaya alam, kecuali sumberdaya tertentu, seperti sungai, lautan, udara, api, dan sebagainya. Pandangan ini juga sejalan dengan Sayyid Qutub. Menurutny, hak milik pribadi merupakan pokok (*asha*l), sedangkan hak milik umum merupakan pengecualian. Sejalan dengan itu, Tahawi mengatakan, negara bisa memberikan batasan kepada hak milik perorangan, mengaturnya atau menyitanya sesudah memberikan ganti rugi yang layak.

Pilar ketujuh, kepemilikan. Konsep kepemilikan pribadi atas dasar sebagai amanat dari Tuhan ini membawa sejumlah implikasi yang sangat penting yang membawa perbedaan revolusioner dengan sistem ekonomi lain seperti kapitalisme dan sosialisme. *Pertama*, bahwa sumber daya diperuntukkan bagi semua orang, bukan untuk sebagian kecil manusia (Q.S. al-Baqarah (2):29). *Kedua*, setiap orang harus memperoleh sumber-sumber daya itu dengan cara yang sah dan halal, bukan cara-cara curang seperti suap dan cara-cara batil lainnya (Q.S. al-Nisa (4): 29). *Ketiga*, tidak seorang pun berwenang menghancurkan atau memboroskan sumber-sumber daya pemberian Tuhan, tindakan ini oleh Al- Quran disamakan dengan *fasad* (kerusakan, kejahatan dan) yang dilarang Tuhan (Q.S. al-Baqarah (2): 205).

Pilar kedelapan, kebebasan dan tanggung Jawab. Prinsip kebebasan dan tanggung jawab dalam ekonomi Islam pertama kali dirumuskan oleh An-Naqvi. Kedua prinsip tersebut, masing-masing dapat berdiri sendiri, tetapi oleh beliau kedua prinsip tersebut digabungkan menjadi satu. Pengertian kebebasan dalam perekonomian Islam dipahami dari dua perspektif, pertama perspektif teologi dan kedua perspektif *ushul fikih* atau falsafah *tasyri*. Pengertian kebebasan dalam perspektif pertama berarti bahwa manusia bebas menentukan pilihan antara yang baik dan yang buruk dalam mengelola sumberdaya alam. Kebebasan untuk menentukan pilihan itu melekat pada diri manusia, karena manusia telah dianugerahi akal untuk memikirkan mana yang baik dan yang buruk, mana yang *maslahah* dan *mafsadah* (mana yang manfaat dan mudharat).

Kebebasan dalam pengertian Islam adalah kebebasan yang terkendali (*al-hurriyah al-muqayyadah*). Dengan demikian, konsep ekonomi pasar bebas, tidak sepenuhnya begitu saja diterima dalam ekonomi Islam. Alokasi dan distribusi sumber daya yang adil dan efisien, tidak secara otomatis terwujud dengan sendirinya berdasarkan kekuatan pasar. Harus ada lembaga pengawas dari otoritas pemerintah -yang dalam Islam- disebut lembaga hisbah.

Pilar kesembilan, jaminan sosial. Islam mendorong agar praktik ekonomi dapat memberikan jaminan sosial pada kaum tidak berdaya. Kewajiban zakat, infaq, shadaqah, dan sejenisnya menunjukkan ideal moral tersebut. Karena itu pelaku ekonomi secara individu menjadikan pengeluaran untuk infaq shadaqah dan zakat sebagai orientasi atau motif bekerjanya, sebagaimana juga Negara diwajibkan memberikan jaminan sosial pada kaum tak berdaya ini.

Pilar kesepuluh, nubuwwah. Prinsip *nubuwwah* dalam ekonomi Islam merupakan landasan etis dalam ekonomi mikro.

Konsep *nubuwwah* mengajarkan bahwa fungsi kehadiran seorang Nabi adalah untuk menjelaskan syariah Allah Swt. kepada umat manusia. Konsep *nubuwwah* juga mengajarkan bahwa Nabi merupakan personifikasi kehidupan yang baik dan benar.

Sifat-sifat utama yang harus dipersonifikasi oleh semua manusia (pelaku bisnis, pemerintah dan segenap manusia) dari Nabi Muhammad saw, setidaknya ada empat, yaitu *shiddiq*, amanah, *tabligh*, dan *fathanah*. ***Siddiq***, berarti jujur dan benar. Prinsip ini harus melandasi seluruh perilaku ekonomi manusia, baik produksi, distribusi maupun konsumsi. ***Amanah***, berarti dapat dipercaya, profesional, kredibilitas dan bertanggung jawab. ***Tablig***, adalah komunikatif, dan transparan, dana pemasaran yang kontiniu. ***Fathanah***, berarti kecerdasan dan intelektualitas *fathanah* mengharuskan kegiatan ekonomi dan bisnis didasarkan dengan ilmu, profesionalitas, jujur, benar, terpercaya dan bertanggung jawab dalam berekonomi dan berbisnis.

D. Politik Ekonomi Islam

Politik ekonomi adalah tujuan yang ingin dicapai oleh hukum-hukum yang dipergunakan untuk memecahkan mekanisme mengatur urusan manusia. Sedangkan politik ekonomi Islam adalah jaminan tercapainya pemenuhan semua kebutuhan primer (*basic needs*) tiap orang secara menyeluruh, berikut kemungkinan tiap orang untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan kadar kesanggupannya.

Islam memandang tiap orang secara pribadi, bukan secara kolektif sebagai komunitas yang hidup dalam sebuah negara. Islam memandang setiap orang sebagai manusia yang harus dipenuhi semua kebutuhan primernya secara menyeluruh. Selanjutnya, Islam memandangnya dengan kapasitas pribadinya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan sekunder dan tersiernya sesuai dengan standar kemampuannya. Kemudian, pada saat yang sama,

Islam memandangnya sebagai orang yang terikat dengan sesamanya dalam intraksi tertentu, yang dilaksanakan dengan mekanisme tertentu.

Politik ekonomi Islam, dengan demikian, bukan hanya bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan dalam sebuah negara semata-mata, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya tiap orang untuk menikmati kehidupan tersebut. Politik ekonomi Islam juga bukan hanya bertujuan untuk mengupayakan kemakmuran individu dengan membiarkan mereka sebebas-bebasnya untuk memperoleh kemakmuran tersebut dengan cara apa pun, tanpa memperhatikan terjamin-tidaknya hak hidup setiap orang.

Dalam hal ini, politik ekonomi Islam adalah merupakan pemecahan masalah utama yang dihadapi setiap orang, yaitu sebagai manusia yang hidup sesuai dengan interaksi tertentu serta memungkinkan orang yang bersangkutan untuk meningkatkan taraf hidupnya, dan mengupayakan kemakmuran dirinya dalam pola hidup tertentu. Oleh karena itu, ketika mensyariatkan hukum-hukum ekonomi kepada manusia, Islam telah mensyariatkan hukum-hukum itu kepada pribadi. Sedangkan pada saat mengupayakan terjamin-tidaknya hak hidup serta tercapai-tidaknya suatu kemakmuran, Islam telah menjadikan semuanya harus direalisasikan dalam sebuah masyarakat yang memiliki pola hidup tertentu. Islam, dengan demikian, memperhatikan segala hal yang menjadi tuntutan masyarakat sebagai asas dalam memandang kehidupan dan kemakmuran. Oleh karena itu, hukum-hukum syara telah menjamin tercapainya pemenuhan seluruh kebutuhan primer tiap warga negara Islam secara menyeluruh, seperti sandang, papan, dan pangan. Caranya adalah dengan mewajibkan bekerja kepada tiap laki-laki yang mampu bekerja, sehingga dia bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya sendiri, berikut kebutuhan-kebutuhan orang-orang yang nafkahnya menjadi

tanggungannya. Kalau orang itu sudah tidak mampu bekerja, maka Islam mewajibkan kepada anak-anak serta ahli warisnya untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan primernya. Apabila yang wajib menanggung nafkahnya tidak ada, maka *baitul mal*-lah yang wajib memenuhinya.

Islam telah menjadikan hukum mencari rezeki tersebut adalah fardlu, seperti dinyatakan dalam Alquran surat al-Mulk (67) ayat 15: "Maka, berjalanlah di segala penjurunya, serta makanlah sebageian dari rezeki-Nya". Nabi saw. bersabda: "Tidaklah seseorang makan sesuap saja yang lebih baik, selain makan dari hasil kerja tangannya sendiri"; pada hadis yang lain dinyatakan: "Bahwa Rasulullah saw. menyalami tangan Sa'ad bin Mu'adz r.a., dan ketika itu tangan Sa'ad *ngapal* (bekas-bekas karena pekerjaan). Kemudian keadaan tangan itu ditanyakan Nabi saw., lalu Sa'ad menjawab: "saya selalu mengayunkan skop dan kapak untuk mencarikan nafkah keluargaku". Kemudian Nabi saw. menciumi tangan Sa'ad dan bersabda: "Inilah dua telapak tangan yang disukai oleh Allah Swt."

E. Kaidah Umum Ekonomi Islam

Menurut Taqyuddin An-Nabhani (2009: 61-64) ada tiga kaidah umum menyangkut ekonomi Islam, yaitu kepemilikan (*property*), pengelolaan kepemilikan, dan distribusi kekayaan di tengah-tengah masyarakat.

Pertama, kepemilikan (*property*). Dari segi kepemilikan, bahwa Allahlah yang merupakan pemilik segala kekayaan. Allah menyatakan dalam Alquran surat an-Nur (24) ayat 33: "dan berikanlah kepada mereka, harta dari Allah yang telah Dia berikan kepada kalian". Oleh karena itu, kakayaan adalah milik Allah semata. Namun demikian, Allah telah menyerahkan kekayaan tersebut kepada manusia untuk diatur sedemikian rupa. Dalam surat al-Hadid (57) ayat 7 dinyatakan: "dan nafkahkanlah apa saja

yang telah kalian dijadikan (oleh Allah) berkuasa terhadapnya"; demikian juga dalam surat Nuh (71) ayat 12: "dan (Allah) membanyakkan harta dan anak-anakmu".

• Dalam pemilikan ini, terdapat kepemilikan individu (*private property*), sehingga setiap orang bisa memiliki kekayaan dengan sebab-sebab atau cara-cara kepemilikan tertentu. Seperti telah diriwayatkan oleh Abu Daud dari Samurah bahwa Nabi saw. bersabda: "dan siapa saja yang memagari sebidang tanah, maka tanah tersebut adalah menjadi haknya". Pada saat yang sama, diakui pula adanya kekayaan yang merupakan milik umum (*collective property*). Imam Ahmad bin Hanbal meriwayatkan bahwa Nabi saw. bersabda: "manusia sama-sama membutuhkan dalam tiga hal, yaitu air, padang gembala, dan api".

Adapun sebab-sebab kepemilikan harta adalah sebab yang menjadikan seseorang memiliki harta tersebut, yang sebelumnya tidak menjadi hak miliknya. Dengan demikian, ia mengharuskan adanya sebab-sebab yang diizinkan oleh Allah Swt. sampai kepemilikan tersebut benar-benar sah. Oleh karena itu, apabila syarat-syarat syar'i itu ada, maka pemilikan atas harta itu sah. Sebaliknya, apabila sebab syar'i tersebut tidak ada maka pemilikan atas harta tersebut menjadi tidak sah, meskipun harta itu secara *de facto* telah diperoleh. Dalam ajaran Islam, sebab-sebab yang menentukan pemilikan seseorang atas harta tersebut, antara lain karena sebab bekerja, warisan, dan harta pemberian berupa hibah atau hadiah.

Selain itu, dalam Islam dikenal pula adanya kepemilikan oleh negara. Apabila ada seorang Muslim meninggal dunia, sementara orang tersebut tidak mempunyai ahli waris, maka harta kekayaannya adalah dimiliki oleh negara, masuk ke dalam *baitul mal* (kas negara). Kekayaan lain yang masuk ke dalam *baitul mal* antara lain *zakat*, *kharaj*, dan *jizyah*. Apa yang menjadi hak milik

baitul mal, adalah milik negara, kecuali *zakat*, sehingga negara berkewajiban mendistribusikannya sesuai dengan berpijak pada hukum-hukum syara.

Kedua, pengelolaan kepemilikan. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan umum itu adalah hak negara, karena negara adalah wakil umat. Ditegaskan oleh an-Nabhani bahwa syara telah melarang negara untuk mengelola kepemilikan umum dengan cara barter (*mubadalah*) atau dipapling untuk orang tertentu. Pengelolaan kepemilikan oleh negara harus berpijak pada hukum-hukum yang diperbolehkan oleh syara. Pengelolaan kepemilikan yang berhubungan dengan kepemilikan negara dan kepemilikan oleh individu sudah dijelaskan dalam hukum-hukum muamalah, seperti jual-beli atau perdagangan, koperasi, penggadaian, persewaan, perseroan (*syirkah*), asuransi, dan sebagainya.

Ketiga, distribusi kekayaan. Adapun tentang cara distribusi kekayaan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Hanya saja, perbedaan individu dalam masalah kemampuan dan kebutuhan akan suatu pemenuhan, bisa juga menyebabkan perbedaan distribusi kekayaan tersebut di antara mereka. Oleh karena itu, syara melarang perputaran kekayaan hanya di antara orang-orang kaya, dan mewajibkan perputaran tersebut terjadi di antara semua orang secara berimbang. Dalam Alquran surat al-Hasyr (59) ayat 7 Allah Swt. berfirman: "*supaya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu*".

Atas dasar ayat di atas, maka negara harus memberikan harta, baik yang bergerak maupun tidak bergerak. Maksud pemberian harta tersebut bukan sekedar untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat temporal, melainkan pemberian harta tersebut sebagai sarana terpenuhinya kepemilikan atas kekayaan

yang dapat dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Ketika negara melihat adanya ancaman terhadap keseimbangan ekonomi di dalam masyarakat, maka negara harus menyelesaikan ancaman tersebut.

«Fenomena bobroknya distribusi dan sirkulasi kekayaan di antara individu di berbagai negara seringkali terjadi. Para ahli ekonomi kapitalis ketika membahas teori distribusi pendapatan, seringkali mengabaikan buruknya distribusi pendapatan personal, dan mereka pun sering berhenti pada tingkat penghitungan semata. Sementara kaum sosialis, tidak menemukan cara untuk memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut, selain hanya membatasi hak milik dengan cara menghilangkan hak milik (An-Nabhani, 2009: 275).

Sementara itu, ajaran Islam justru telah menjamin distribusi tersebut, yaitu dengan menentukan tata cara pemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta menyuplai harta kepada orang yang tidak sanggup mencukupi kebutuhan hidupnya. Islam memang tidak mengharuskan adanya kesamaan di antara manusia dalam hal kepemilikan, namun Islam mengharuskan adanya ketidaktergantungan masing-masing orang terhadap orang lain, dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. *Nabi* saw. bersabda: "sebaik-baik sedekah adalah sedekah dari orang yang kaya" (H.R. Al-Bukhari). Meskipun demikian, pada saat yang sama, Islam mengharamkan terjadinya penimbunan benda-benda tertentu meskipun zakatnya telah dikeluarkan.

Perbedaan antara penimbunan dengan saving adalah, bahwa kalau penimbunan berarti mengumpulkan suatu benda atau komoditas tertentu dengan tujuan benda-benda tersebut selanjutnya dapat dijual dengan menunggu naiknya harga yang lebih mahal. Sementara saving atau menabung adalah penyimpanan uang atau benda-benda tertentu disebabkan adanya

kebutuhan tertentu, semisal mengumpulkan uang atau menyimpan benda-benda tertentu, seperti emas atau perak, untuk cadangan membangun rumah, biaya sekolah, dan sejenisnya.

F. Perkembangan Ekonomi Islam di Indonesia

Dalam konteks Indonesia, seperti digambarkan Liky Faisal dalam makalahnya yang berjudul "Politik Ekonomi Islam dalam Pembangunan Ekonomi Nasional Indonesia", politik ekonomi Islam di Indonesia terlihat dalam bentuk "intervensi" pemerintah dalam berbagai bentuk perundang-undangan dan kebijakan. Intervensi ini bermakna positif karena bukan kooptasi terhadap ekonomi Islam tetapi justru mendorong perkembangan ekonomi Islam.

Secara politik ekonomi Islam, ada sejumlah alasan yang mengharuskan pemerintah Indonesia melakukan intervensi terhadap pengembangan ekonomi Islam, yaitu: (1) Industri keuangan syariah memiliki dampak yang positif bagi stabilitas perekonomian makro Indonesia, (2) Industri keuangan syariah memiliki ketahanan atau resistensi yang cukup tinggi terhadap goncangan krisis keuangan, (3) Diperlukannya peran aktif pemerintah sebagai regulator dan supervisor sehingga tercipta efisiensi, transparansi dan berkeadilan, (4) Ekonomi Islam dapat berperan sebagai penyelamat bila terjadi ketidakpastian usaha atau perekonomian, dan (5) Dalam teori maupun realitasnya, industri keuangan syariah membutuhkan infrastruktur yang mendukung perkembangannya. Dalam koridor itulah, politik ekonomi Islam pemerintah Indonesia telah mengundang beberapa Undang-Undang, yang dapat dipaparkan sebagai berikut.

1. UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN).

UU Nomor 19 tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) disahkan pada 7 Mei 2008. Lahirnya UU SBSN memberikan harapan di tengah APBN yang selalu defisit untuk

bisa mendorong tersedianya sumber keuangan alternatif bagi negara. UU SBSN telah menjadi landasan hukum bagi pemerintah Indonesia untuk penerbitan sukuk negara guna menarik dana dari investor. Sukuk dipandang sebagai alternatif yang lebih baik daripada berutang ke luar negeri karena mengandung unsur kerja sama investasi, berbagi risiko, dan keterlibatan aset (proyek riil) yang juga mendasari penerbitan sukuk.

Sukuk negara ada yang diterbitkan untuk investor besar (institusi) disebut IFR (*ijara fixed rate*) yang minimal pembeliannya 1 Miliar. Sedangkan untuk perorangan (ritel) disebut Sukuk Ritel (SR) yang diterbitkan setiap Februari. Tujuan utama pemerintah menerbitkan sukuk negara adalah untuk membiayai APBN, termasuk membiayai pembangunan proyek. Ini menunjukkan dukungan pemerintah untuk mendanai APBN dengan instrumen keuangan Syariah, dan terbukti perkembangan sukuk global maupun ritel sangat pesat setelah ada *political will* pemerintah dengan mengesahkan UU SBSN.

2. UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Pada 17 Juni 2008 telah diundangkan UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Lahirnya UU Perbankan Syariah menandai era baru perbankan Syariah berpayung hukum jelas. Dengan UU Perbankan Syariah makin memperkuat landasan hukum perbankan Syariah sehingga dapat setara dengan bank konvensional. Selain itu, payung hukum ini makin menguatkan eksistensi perbankan syariah di Indonesia dan juga dapat memacu peningkatan peran dan kontribusi perbankan syariah dalam mengentaskan kemiskinan (*poverty alleviation*), kesejahteraan masyarakat, dan pembukaan lapangan kerja serta pembangunan nasional.

Perlu digarisbawahi bahwa perkembangan pesat perbankan syariah tidak bisa dilepaskan dari dukungan regulasi.

Kehadiran bank syariah pertama pada 1992, yaitu Bank Muamalat Indonesia, terjadi berkat dukungan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992. *Booming* perbankan syariah sejak 1999 juga hasil dari dukungan regulasi, yaitu Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 yang kemudian diperkuat oleh UU Nomor 3 Tahun 2004. Setelah diundangkannya UU Perbankan Syariah terjadi akselerasi perkembangan perbankan Syariah di Indonesia.

3. Pemerintah yang diwakili BUMN mendirikan Bank Syariah.

Bukti nyata nyata dari politik ekonomi Islam yang diperankan pemerintah dalam sektor industri perbankan Syariah adalah berdirinya Bank Syariah Mandiri (BSM) yang modal inti terbesarnya dari Bank Mandiri yang nota bene merupakan bank BUMN. Berdirinya BRI Syariah yang modal inti terbesarnya dari Bank BRI yang juga merupakan bank BUMN. BNI Syariah yang modal inti terbesarnya dari BNI 45 yang juga adalah bank BUMN berplat merah. Selanjutnya, pegadaian Syariah yang berada di bawah perum pegadaian yang juga merupakan BUMN, dan lain-lain.

4. UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf.

Untuk melengkapi Undang-Undang no. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, pemerintah juga telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 41 tahun 2004, ditambah Kepmen Nomor 04 Tahun 2009 tentang Administrasi Wakaf Uang. Sebelum itu, telah ada berbagai peraturan yang mengatur tentang wakaf.

Peraturan yang mengatur tentang wakaf adalah UU No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, khususnya pasal 5, 14 (1), dan 49, PP No. 28 Tahun 1977 tentang Perwakafan Tanah Milik. Peraturan Menteri No. 1 Tahun 1978 tentang Peraturan Pelaksanaan PP No. 28 Tahun 1977.

Intruksi Bersama Menag RI dan Kepala BPN No. 4 Tahun 1990 tentang Sertifikat Tanah Wakaf. Badan Pertanahan Nasional No. 630.1-2782 tentang Pelaksanaan Penyertifikatan Tanah Wakaf, Inpres No. 1 Tahun 1991 tentang KHI. SK Direktorat BI No. 32/34/KEP/DIR tentang Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 29 ayat 2 berbunyi: bank dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*). SK Direktorat BI No. 32/36/KEP/DIR tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah (pasal 28 berbunyi: BPRS dapat bertindak sebagai lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakaf, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam bentuk santunan dan atau pinjaman kebajikan (*qard al-hasan*). Selanjutnya, sejak tahun 2007 telah pula berdiri BWI (Badan Wakaf Indonesia).

5. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI).

MUI sebagai lembaga yang memiliki kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan syariah yang berskala nasional yang bernama Dewan Syariah Nasional (DSN), berdiri pada tanggal 10 Februari 1999 sesuai dengan Surat Keputusan (SK) MUI No. kep-754/MUI/II/1999. Lembaga DSN MUI ini merupakan lembaga yang memiliki otoritas kuat dalam penentuan dan penjagaan penerapan prinsip Syariah dalam operasional di lembaga keuangan Syariah, baik perbankan Syariah, asuransi Syariah dan lain-lain.

Sebagaimana termuat dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 32 maupun UU No. 40 Th 2007 tentang Perseroan Terbatas pasal 109 yang pada intinya bahwa

Dewan Pengawas Syariah wajib dibentuk di bank Syariah maupun perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Dewan Pengawas Syariah tersebut hanya dapat diangkat jika telah mendapatkan rekomendasi DSN MUI. Keberadaa ulama dalam stuktur kepengurusan perbankan maupun perseroan lainnya merupakan keunikan tersendiri bagi suatu lembaga bisnis.

Para ulama yang berkompeten di bidang hukum syariah dan aplikasi perbankan dan perseroan yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah memiliki fungsi dan peranan yang amat besar dalam penetapan dan pengawasan pelaksanaan prinsip-prinsip syariah dalam lembaga bisnis. Kewenangan ulama dalam menetapkan dan mengawasi plaksanaan hukum perbankan syariah berada di bawah koordinasi Dewan Syariah Nasional majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). DSN adalah dewan yang dibentuk oleh MUI untuk menangani maslah-masalah yang berhubungan dengan aktivitas lembaga keuangan syariah. Sedangkan Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah badan yang ada di lembaga keuangan syariah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan DSN di lembaga keuangan syariah. DSN membantu pihak terkait seperti Departemen keuangan, Bank Indonesia, dan lain-lain, dalam menyusun peraturan atau ketentuan untuk lembaga keuangan syariah. Keanggotaan DSN terdiri dari para ulama, praktisi, dan para pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syariah.

Keanggotaan DSN ditunjuk dan diangkat oleh MUI untuk masa bakti 4 tahun. Tugas dan kewenangan Dewan Syariah nasional adalah sebagai berikut: (a) Menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan keuangan pada khususnya; (b) Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan; (c)

Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan syariah; dan (d) Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

Untuk dapat menjalankan tugas, Dewan Syariah Nasional memiliki kewenangan: (a) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait; (b) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan atau peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen Keuangan dan Bank Indonesia; (c) Memberikan rekomendasi dan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai DPS pada suatu lembaga keuangan syariah; (d) Mengundang para ahli menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga keuangan dalam maupun luar negeri; (e) Memberikan peringatan kepada lembaga-lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN; dan (f) Mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan

Untuk memperkuat kewenangan sebagai bank sentral yang mengurus sistem keuangan syariah dalam negara republik Indonesia, Bank Indonesia menjalin kerja sama dengan DSN-MUI yang memiliki otoritas di bidang hukum syariah. Bentuk kerja sama antara Bank Indonesia dengan DSN-MUI diwujudkan melalui nota kesepahaman (*Memorandum of Understanding/MOU*) untuk menjalankan fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap perbankan syariah. Dengan adanya kerja sama tersebut, berarti keberadaan DSN-MUI menjadi sangat penting dalam pengembangan sistem ekonomi dan perbankan syariah negeri ini.

6. UU No. 38 Tahun 1999 tentang Zakat.

Diundangkannya UU Zakat menunjukkan politik ekonomi Islam dalam ranah keuangan publik pemerintah RI

cukup akomodatif terhadap kebutuhan umat Islam untuk melaksanakan rukun Islam yang ke-3. Menurut Direktorat Pemberdayaan Zakat yang disampaikan dalam Lokakarya Peradaban Zakat di DIY, 7-9 April 2008 potensi zakat yang dapat dikumpulkan secara nasional mencapai 39 triliun Rupiah per tahun. Angka ini hampir sama dengan hasil kajian Rumah Zakat pada tahun 2007. Padahal dari potensi yang sebegitu besar itu, baru 1 triliun-an yang dapat dihimpun. Persoalannya, karena UU tersebut belum bisa berperan optimal untuk menarik zakat.

Dalam hal ini tampaknya perlu adanya politik ekonomi Islam lanjutan untuk lebih memikat muzakki, misalnya zakat yang semula hanya sebagai pengurang penghasilan kena pajak (PPKP) ditingkatkan menjadi pengurang pajak (*tax deductible*). Misalnya PPh terhadap penghasilan (profesi) di atas Rp. 50.000.000,00 s.d Rp. 250.000.000,00 adalah 15% (Tarif PPh Pasal 17 UU PPh No 36 tahun 2008). Subjek pajaknya sudah membayar zakat sebesar 2,5%, maka tinggal membayar Pajak kekuarangannya, yaitu $15\% - 2,5\% = 12,5\%$. Dengan demikian, fungsi zakat sebagai penghargaan (*reward*) terhadap pembayar pajak, menjadi lebih signifikan. Dengan kebijakan itu, meski pajak secara prosentase menjadi lebih kecil, namun proyeksi total *amount*-nya akan lebih besar seiring besarnya semangat rakyat membayar pajak.

7. UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama.

Diundangkannya Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah memberikan arah baru bagi kompetensi Peradilan Agama. Semula kompetensi Pengadilan Agama identik dengan NTCR (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk), akan tetapi dengan adanya UU Nomor 3 Tahun 2006 tersebut, kompetensi Peradilan Agama bertambah, khususnya sebagaimana yang tersebut dalam pasal 49 huruf i, yakni Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa,

memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi Syariah.

Ekonomi Syariah yang dimaksud dalam pasal 49 huruf i, penjelasannya mencakup (a) bank syari'ah; (b). lembaga keuangan mikro syari'ah. (c). asuransi syari'ah; (d). reasuransi syari'ah; (e). Reksa dana syari'ah; (f). obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syariah g). sekuritas syari'ah; (h). pembiayaan syari'ah; (i). Pegadaian syari'ah; (j). dana pensiun lembaga keuangan syari'ah; dan (k). bisnis syari'ah.

Salah satu pertimbangan diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2006, poin c adalah bahwa Peradilan Agama sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dan kehidupan ketatanegaraan menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perkembangan kebutuhan hukum masyarakat tidak dapat dipenuhi dengan UU No. 7 Tahun 1989, terutama setelah tumbuh dan berkembangnya praktik ekonomi Islam di Indonesia.

Berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2006, peradilan yang berkompeten untuk menyelesaikan perkara di bidang ekonomi Syariah adalah pengadilan agama. Di samping itu, dibuka pula kemungkinan penyelesaian sengketa melalui musyawarah, mediasi perbankan, lembaga arbitrase, atau melalui pengadilan di lingkungan Peradilan Umum sepanjang disepakati di dalam akad oleh para pihak. Ketentuan ini juga memberikan kepastian saluran hukum bagi pencari keadilan dalam masalah yang timbul di bank Syariah.

8. KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah).

Penyusunan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES) yang dikoordinir oleh Mahkamah Agung (MA) RI yang kemudian dilegalkan dalam bentuk Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) 02 Tahun 2008 merupakan respon terhadap perkembangan

baru dalam kajian dan praktik ekonomi Islam di Indonesia. Praktik hukum ekonomi Islam secara institusional di Indonesia itu sudah dimulai sejak berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1991, kemudian disusul oleh lembaga keuangan syari'ah (LKS) lainnya setelah melihat prospek dan ketangguhan LKS seperti BMI ketika melewati krisis ekonomi nasional sekitar tahun 1998.

Belakangan, perkembangan LKS tersebut semakin pesat yang tentu akan menggambarkan banyaknya praktik hukum muamalat di kalangan umat Islam. Praktik hukum tersebut juga sarat dengan berbagai permasalahan yang muncul akibat dari tarik menarik antar kepentingan para pihak dalam persoalan ekonomi, sementara untuk saat ini belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur secara khusus terhadap permasalahan itu. Sejak tahun 1994, jika ada sengketa ekonomi syariah maka diselesaikan lewat Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) yang hanya sebagai mediator (penengah) dan belum mengikat secara hukum. Peraturan yang diterapkan juga masih terbatas pada peraturan Bank Indonesia (BI) yang merujuk kepada fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Sedangkan fatwa itu, sebagaimana dimaklumi dalam hukum Islam, adalah pendapat hukum yang tidak mengikat seluruh umat Islam.

Sama halnya dengan fikih, kehadiran KHES merupakan upaya positivisasi hukum perdata Islam dalam sistem hukum nasional. Untuk saat ini positivisasi hukum ekonomi Islam sudah menjadi keniscayaan bagi umat Islam, mengingat praktik ekonomi syari'ah sudah semakin semarak melalui LKS-LKS. Kompilasi tersebut kemudian dijadikan acuan dalam penyelesaian perkara-perkara ekonomi syari'ah yang semakin hari semakin bertambah, seiring dengan perkembangan LKS. Adapun lembaga peradilan yang berkompetensi dalam

penerapan KHES adalah Peradilan Agama (PA) sebagaimana diamanatkan UU No. 3 Tahun 2006.

9. Gerakan Wakaf Tunai.

Gerakan nasional wakaf tunai dimotori oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara Jakarta pada 8 Januari 2010, pengelolaannya diserahkan ke Badan Wakaf Indonesia (BWI). BWI sudah membuat aturan tentang wakaf uang sehingga pengumpulan, penggunaannya dan pertanggungjawabannya dapat transparan serta akan diaudit oleh auditor independen.

Wakaf selama ini identik dengan tanah, namun dengan dicanangkannya gerakan nasional wakaf tunai maka kini masyarakat diperkenalkan dengan wakaf berbentuk uang yang lebih fleksibel digunakan untuk kesejahteraan umat sekaligus memudahkan masyarakat yang ingin wakaf karena ada alternatif bentuk wakaf. Wakaf tunai hukumnya adalah dibolehkan, dengan cara menjadikan uang menjadi modal usaha dan keuntungannya disalurkan pada penerima wakaf. Dalam peresmian tersebut, Presiden SBY menyerahkan uang senilai Rp. 100 juta sebagai wakaf uang untuk dikelola oleh BWI, yang diterima langsung oleh Ketua BWI, Tholhah Hasan. Sedangkan Wakil Presiden Boediono juga telah menyerahkan wakaf uang sebesar Rp 75 juta.

10. Dikeluarkannya PP Nomor 39 Tahun 2008 Asuransi syariah tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 73 Tahun 1992 tentang Penyelenggaraan Usaha Perasuransian. Walaupun pemerintah belum mengundang secara khusus tentang asuransi Syariah, akan tetapi hadirnya PP Nomor 39 tersebut menunjukkan keberpihakan pemerintah terhadap pengembangan industri asuransi Syariah sebagai bagian politik ekonomi Islamnya.

11. Didirikannya Direktorat pembiayaan Syariah di DEPKEU. Direktorat Pembiayaan Syariah, Direktorat Jenderal

Pengelolaan Utang Departemen Keuangan RI merupakan direktorat yang melaksanakan amanah UU No. 19 Tahun 2008 tentang SBSN, sehingga lahirnya berbagai jenis sukuk negara, di antaranya adalah sukuk ritel dan korporasi.

12. Penyelenggaraan World Islamic Economic Forum (WIEF) di Indonesia. World Islamic Economic Forum (WIEF) atau Forum Ekonomi Negara-Negara Islam ke-5 yang diselenggarakan di Indonesia, pada 2-3 Maret 2009, dengan didukung penuh oleh pemerintah merupakan suatu bukti dukungan dan *political will* pemerintah terhadap pengembangan ekonomi Islam. World Islamic Economic Forum ke-5 tersebut berkontribusi sebagai salah satu upaya menemukan solusi mengatasi dampak krisis keuangan global dengan pendekatan ekonomi Islam.

G. Penutup

Prinsip-prinsip ekonomi Islam secara rinci memang tidak diatur dalam Alquran dan hadis. Namun, dengan Alquran dan hadis ini juga para ulama kemudian menjelaskan prinsip-prinsip pokok tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam adalah bagian dari muamalah Islam yang sekaligus merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari syariah Islam. Dalam perkembangan ekonomi modern sekarang ini, prinsip-prinsip ekonomi Islam mulai mendapat perhatian khusus dari para ahli ekonomi dunia, mengingat kelemahan-kelemahan yang mulai tampak dalam praksis ekonomi modern yang materialistik dan liberal, sehingga terkadang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan.

Prinsip ekonomi Islam yang sudah digariskan oleh Allah Yang Maha Adil (dalam Alquran) dan kemudian dipraktikkan oleh Rasulullah sebagai pelaku ekonomi kemanusiaan (kerakyatan) (dalam hadis Nabi saw.), dapat menjadi solusi alternatif dalam pemecahan berbagai problem ekonomi yang jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan. Oleh karena itu, penting artinya bagi setiap muslim memahami prinsip-prinsip ekonomi Islam sebagai

pegangan atau dasar dalam melakukan berbagai transaksi ekonomi sehari-hari, baik dalam kancah local, regional, maupun internasional.